LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2016

BIDANG MEKANIKA, ELEKTROTEKNIKA DAN KONSTRUKSI
PUSAT PERUMUSAN STANDAR

Badan Standardisasi Nasional
2017

RINGKASAN EKSEKUTIF

Merujuk Renstra PPS tahun 2015-2019, maka untuk mewujudkan sasaran: tersedianya RASNI yang siap ditetapkan sesuai dengan kebijakan pengembangan standar, maka PPS menetapkan 5 (lima) kegiatan utama yang terdiri dari:

1. Perumusan kebijakan pengembangan standar
2. Pengendalian proses perumusan SNI hingga RASNI siap ditetapkan
3. Pembinaan Sumber Daya Manusia Perumusan SNI
4. Peningkatan Kinerja Komtek/Sub Komtek
5. Fasilitasi Perumusan SNI dan Kaji Ulang SNI

Secara umum, kinerja PPS pada tahun 2015 telah menunjukkan hasil yang memuaskan karena telah mampu memenuhi target yang ditetapkan tahun 2015 dari Sasaran Tahunan, Indikator dan Target PPS yang ditetapkan dalam Renstra PPS tahun 2015-2019. Prosentase tingkat capaian yang diraih pada tahun 2015 adalah:

Target dan realisasi kinerja bidang Mekanika, Elektroteknika dan Konstruksi PPS tahun 2016

No	Sasaran	Indikator kinerja	Target 2016		Realisasi	Satuan
			PPS	Bid. MEK	Bid.MEK 2016	
Customer Perspective						
1.	Meningkatnya kapasitas dan kualitas SNI	1. Jumlah SNI yang difasilitasi pengembangannya	100	25	31	SNI
		2. Prosentase penyelesaian PNPS hingga RASNI tepat waktu	35	35	33,8	%
Internal Process Perspective						
2	Terwujudnya kebijakan pengembangan SNI yang sesuai kebutuhan nasional					
		3. Jumlah rekomendasi terkait Komite Teknis perumusan SNI	30	10	17	dokumen
		4. Jumlah rekomendasi persetujuan usulan Program Nasional Perumusan Standar (PNPS)	450	115	165	dokumen
		5. Jumlah rancangan Pedoman Standardisasi Nasional (PSN) terkait pengembangan SNI	2	1	1	dokumen
3	Terwujudnya RASNI yang siap ditetapkan yang telah memenuhi ketentuan PSN	6. Jumlah RASNI yang siap ditetapkan	450	113	116	RASNI
		CATATAN: Waktu perumusan SNI dari PNPS sampai dengan RASNI	11	11	11,22	Bulan
		7. Jumlah Sekretariat Komtek Perumusan SNI dikelola oleh BSN	20	5	8	Komtek/ Sub Komtek
4	Meningkatnya kualitas SDM perumusan standar	8. Jumlah sumberdaya perumusan standar yang meningkat kompetensinya	550	140	224	orang

No	Sasaran	Indikator kinerja	Target 2016		Realisasi	Satuan
			PPS	Bid. MEK	Bid.MEK 2016	
5	Meningkatnya kualitas Komtek/Sub Komtek perumusan standar	9. Jumlah Komtek/ SubKomtek yang telah memenuhi kriteria penilaian evaluasi kinerja	50	13	13	Komtek/Sub Komtek
		10. Persentase Komtek/ SubKomtek perumusan SNI yang dievaluasi kinerjanya	100	100	90,91	Prosen-tase
6	Terwujudnya fasilitasi program perumusan SNI	11. Jumlah SNI yang dikaji ulang	100	25	0 *)	SNI
		12. Jumlah fasilitasi perumusan RSNI	100	25	31	RSNI
		13. Jumlah fasilitasi penterje-mahan dokumen SNI/SI yang digunakan sebagai RSNI	40	10	0 *)	RSNI

KETERANGAN:

*) Kegiatan tidak dilaksanakan karena adanya pemotongan anggaran.

Sementara itu terkait pagu anggaran PPS tahun 2015 dan realisasinya, maka PPS mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 5.183.795.000, untuk membiayai 5 (lima) kegiatan utama yang ada dimana hasil capaian penyerapan anggaran pada tahun 2016 adalah sebesar 98,77 %.

KATA PENGANTAR

Dalam rangka untuk memenuhi tuntutan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999, maka laporan ini disusun oleh Bidang Mekanika, Elektroteknika dan Konstruksi, Pusat Perumusan Standar (PPS) sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada seluruh pemangku kepentingan yang terkait, khususnya kepada lembaga pembina Badan Standardisasi Nasional yang merupakan instansi induk dari Bidang Mekanika, Elektroteknika dan Konstruksi-PPS.

Tak lupa kami panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas hidayah dan tuntunan yang telah diberikan kepada kami beserta seluruh staf di lingkungan Bidang Mekanika, Elektroteknika dan Konstruksi - PPS, sehingga pencapaian kinerja unit kerja Bidang Mekanika, Elektroteknika dan Konstruksi - PPS tahun 2016 dan penyusunan laporan ini dapat terwujud dengan baik.

Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Mekanika, Elektroteknika dan Konstruksi - PPS sepanjang tahun 2016 pada umumnya dan dalam penyusunan laporan ini, masih jauh dari sempurna sebagaimana diharapkan oleh banyak pihak. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan masukan perbaikan dan kritik yang membangun untuk tercapainya hasil yang lebih sempurna di waktu-waktu yang akan datang.

Akhirnya, besar harapan kami bahwa laporan ini akan dapat memberikan manfaat yang nyata, paling tidak dalam hal penyediaan informasi yang terkait dengan kegiatan pengembangan SNI, terkait dengan bidang Mekanika, Elektroteknika dan Konstruksi, bagi para pembaca dan pengguna dokumen ini.

Jakarta, Januari 2017
Kepala Bidang Mekanika, Elektroteknika dan Konstruksi
Pusat Perumusan Standar

Yustinus Kristianto Widiwardono
NIP 196812041987121001

DAFTAR ISI

Ringkasan Eksekutif i
Kata Pengantar iii
Daftar Isi iv
Daftar Tabel v
Daftar Gambar vi
Daftar Diagram vii
LAMPIRAN 50
PUSTAKA ACUAN 53

DAFTAR TABEL

Tabel 1 – Klasifikasi jumlah SDM Pusat Perumusan Standar berdasarkan jenis kelamin, golongan, pendidikan dan usia 3
Tabel 2 – Pengelolaan Komtek/SubKomtek Perumusan SNI per bidang di PPS..... 8
Tabel 3 – Pagu anggaran DIPA PPS tahun 2016..... 11
Tabel 4 – Sasaran Strategis PPS Tahun 2015-2019..... 18
Tabel 5 – Target kinerja PPS dan bidang MEK tahun 2016 32
Tabel 6 - Distribusi fasilitasi perumusan SNI adopsi SI 35
Tabel 7 – Monitoring target Quick Win 13 bulan penetapan SNI 36
Tabel 8 – Target dan realisasi penetapan SNI dibandingkan dengan usulan PNPS 38
Tabel 9 – Pengelolaan Komtek/SubKomtek Perumusan SNI di bidang MEK tahun 2016 39
Tabel 10 – Pembinaan SDM Perumusan SNI tahun 2016 dan kontribusi bidang MEK 41
Tabel 11 – Tabulasi kegiatan pembinaan SDM perumusan SNI tahun 2015 dan 2016..... 42
Tabel 12 – Kriteria evaluasi kinerja Komtek tahun 2016..... 43
Tabel 13 - Komtek di lingkup bidang MEK yang memenuhi scoring evkin tahun 2016 43
Tabel 14 – Komtek di lingkup bidang MEK yang lolos *desk assessment* evkin tahun 2016 44
Tabel 15 – Pagu anggaran PPS dan realisasi penyerapan anggaran DIPA tahun 2016 46
Tabel 16 – Target dan realisasi kinerja bidang MEK PPS tahun 2016 48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 – Struktur organisasi Badan Standardisasi Nasional - BSN 2
Gambar 2 – Struktur organisasi Pusat Perumusan Standar BSN 2
Gambar 3 – Tahapan Perumusan SNI sesuai dengan PSN 01:2015 6
Gambar 4 – Tahapan Perumusan SNI sesuai dengan PSN 01:2015 14
Gambar 5 – Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian dalam UU No. 20 Tahun 2014 16

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1 – Komposisi Pegawai PPS menurut jenis kelamin 4
Diagram 2 – Komposisi Pegawai PPS menurut rentang usia 4
Diagram 3 – Komposisi Pegawai PPS menurut latar belakang pendidikan 5
Diagram 4 – Komposisi Pegawai PPS menurut golongan ruang 5
Diagram 5 – Distribusi pengelolaan Komtek/Sub Komtek oleh bidang di lingkungan PPS 9
Diagram 6 – Perbandingan kategori PNPS lingkup bidang MEK antara tahun 2015 dan 2016 37

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum Organisasi

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik didukung oleh unsur akuntabilitas yang baik pula. Sehubungan dengan hal tersebut sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Bidang Mekanika, Elektroteknika dan Konstruksi - Pusat Perumusan Standar (PPS), Kedeputian Bidang Penelitian dan Kerjasama Standardisasi (PKS) - BSN menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BSN Tahun 2016 sebagai perwujudan kewajiban Bidang Mekanika, Elektroteknika dan Konstruksi – PPS dalam mempertanggungjawabkan capaian tingkat kinerja pelaksanaan sasaran yang telah ditetapkan oleh BSN. Hal ini juga dapat dijadikan sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja Bidang Mekanika Elektroteknika dan Konstruksi - PPS di tahun yang akan datang kepada seluruh pemangku kepentingan yang terkait.

Dalam melaksanakan tugasnya, Mekanika Elektroteknika dan Konstruksi - PPS berpedoman pada perencanaan strategis 5 (lima) tahunan yang telah ditetapkan oleh BSN, untuk menjamin bahwa pencapaian visi, misi, serta tujuan PPS-BSN mampu mendukung pencapaian sasaran dan tujuan organisasi Kedeputian Bidang Penelitian dan Kerjasama Standardisasi khususnya, dan organisasi BSN pada umumnya.

Mengacu pada Organisasi dan Tata Kerja BSN (Kep. Ka.BSN No.965/BSN-I/HK.35/05/2001, yang kemudian diubah beberapa kali) PPS-BSN mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi program dan penyusunan rencana di bidang pengembangan sistem perumusan, perumusan dan evaluasi Standar Nasional Indonesia, serta menyusun pedoman di bidang Metrologi teknik, Standar dan evaluasi Uji dan Kualitas (MSUK), dan pemberian tanggapan terhadap konsep standar baik secara bilateral, regional maupun international.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusat Perumusan Standar menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. penyiapan rumusan kebijakan di bidang perumusan dan revisi Standar Nasional Indonesia;
b. pembinaan dan pengembangan sistem perumusan Standar Nasional Indonesia;
c. perumusan dan revisi Standar Nasional Indonesia;
d. pelaksanaan evaluasi perumusan dan revisi Standar Nasional Indonesia.

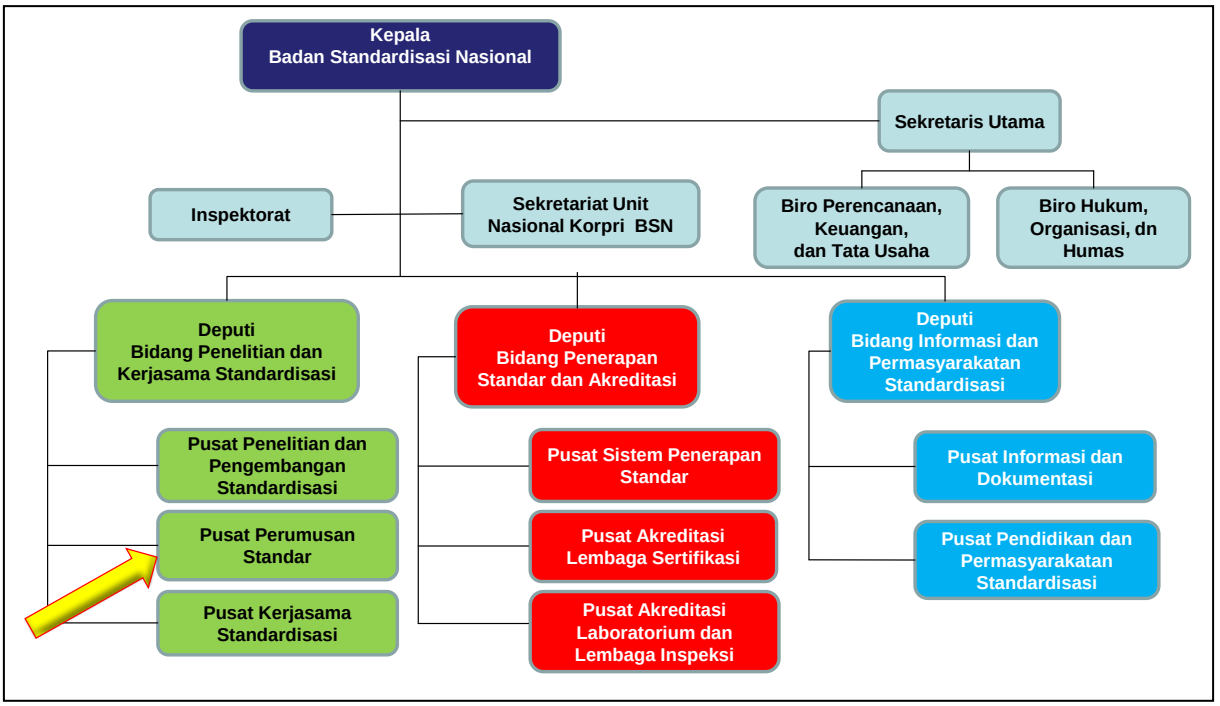

Gambar 1 – Struktur organisasi Badan Standardisasi Nasional - BSN

Pusat Perumusan Standar yang merupakan salah satu dari 3 (tiga) unit kerja eselon II yang ada di Kedeputian bidang Penelitian dan Kerjasama Standardisasi, membawahi empat bidang dan kelompok jabatan fungsional, yaitu:

a. Bidang Pertanian, Pangan dan Kesehatan;
b. Bidang Kimia dan Pertambangan;
c. Bidang Mekanika, Elektroteknika dan Konstruksi;
d. Bidang Lingkungan, dan Serbaneka.
e. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 2 – Struktur organisasi Pusat Perumusan Standar BSN

Dalam organisasi Kedeputian PKS, PPS berperan sebagai pilar utama dalam pelaksanaan program pengembangan standar, dimana dalam operasional hariannya didukung oleh empat bidang yang ada tersebut dengan tugas-tugas sebagai berikut:

(1) Bidang Pertanian, Pangan dan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan pedoman, norma, kriteria, prosedur, program, dan perencanaan di bidang MSUK serta melaksanakan perumusan dan revisi standar dan memenuhi permintaan tanggapan terhadap standar regional dan internasional di bidang pertanian, pangan dan kesehatan.

(2) Bidang Kimia dan Pertambangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan pedoman, norma, kriteria, prosedur, program dan perencanaan di bidang MSUK serta melaksanakan perumusan dan revisi standar dan memenuhi permintaan tanggapan terhadap standar regional dan internasional di bidang kimia dan pertambangan.

(3) Bidang Mekanika, Elektronika dan Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan pedoman, norma, kriteria, prosedur, program dan perencanaan di bidang MSUK serta melaksanakan perumusan dan revisi standar dan memenuhi permintaan tanggapan terhadap standar regional dan internasional di bidang mekanika, elektroteknika, dan konstruksi.

(4) Bidang Mekanika, Elektroteknika dan Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan pedoman, norma, kriteria, prosedur, program dan perencanaan di bidang MSUK serta melaksanakan perumusan dan revisi standar dan memenuhi permintaan tanggapan terhadap standar regional dan internasional di bidang Mekanika, Elektroteknika dan Konstruksi.

Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Mekanika Elektroteknika dan Konstruksi - PPS pada awalnya berjumlah 12 (dua belas) orang, namun karena adanya promosi dan mutasi pegawai pada bulan November 2016, maka sampai dengan Desember 2016 tinggal berjumlah 11 (sebelas) orang. Selain itu dua staff melakukan tugas belajar.

Adapun komposisi pegawai PPS menurut jenis kelamin diketahui hampir berimbang, sebagaimana dapat dilihat pada Diagram 1 di bawah ini.

Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Pusat Perumusan Standar sampai dengan Desember 2016 berjumlah 44 (empat puluh empat) orang dengan Klasifikasi jumlah SDM Pusat Perumusan Standar berdasarkan jenis kelamin, golongan, pendidikan dan usia di dalam table 1.

Tabel 1 – Klasifikasi jumlah SDM Pusat Perumusan Standar berdasarkan jenis kelamin, golongan, pendidikan dan usia

Jabatan & Bidang	Jumlah Personil	Gender		Golongan			Pendidikan				Usia			
		Pria	Wanita	II	III	IV	D3	S1	S2	S3	≤30	31-40	41-50	>50
KAPUS	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1
PPK	11	5	6	1	9	1	0	9	1	1	7	3	0	1
MEK	12	8	4	1	10	1	1	7	4	0	6	5	1	0
KP	11	6	5	0	10	1	0	10	1	0	5	5	0	1
LS	9	5	4	0	8	1	0	9	0	0	6	2	1	0
TOTAL	44	25	19	2	37	5	1	35	7	1	24	15	2	3

Menurut klasifikasi berdasarkan jenis kelamin, maka SDM di Pusat Perumusan Standar hampir berimbang komposisinya antara pria dan wanita, sebagaimana gambar 3.

Diagram 1 – Komposisi Pegawai PPS menurut jenis kelamin

Bila pegawai PPS dilihat dari usia mereka pada saat ini, maka komposisi menurut rentang usianya saat ini **paling banyak** didominasi oleh mereka yang berusia produktif (usia antara 21 tahun sampai 40 tahun) yaitu **sebesar 89%**, sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 4.

Diagram 2 – Komposisi Pegawai PPS menurut rentang usia

Sementara itu berdasarkan latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh pegawai PPS, maka mayoritas memiliki latar belakang pendidikan sarjana, sebagaimana dapat dilihat pada gambar 5 di bawah ini.

Diagram 3 – Komposisi Pegawai PPS menurut latar belakang pendidikan

Selanjutnya bila pegawai PPS dilihat dari status golongan ruang jabatan yang dimiliki oleh masing-masing pegawai pada saat ini, terlihat mayoritas merupakan pegawai dengan golongan III, dengan komposisi dapat dilihat pada Gambar 4 di bawah ini.

Diagram 4 – Komposisi Pegawai PPS menurut golongan ruang

Fungsi-fungsi unit kerja yang ada di lingkungan PPS merupakan unit operasional untuk mendukung implementasi kebijakan pengembangan standar nasional dan program strategis BSN lainnya. Menurut PP 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional, yang kemudian diperkuat dengan UU No.20 tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, standar nasional yang dikembangkan Indonesia dikenal dengan nama Standar Nasional Indonesia (SNI), dan dinyatakan sebagai satu-satunya standar yang berlaku di seluruh Indonesia.

Sebagai salah satu unit kerja dari Kedeputian PKS, Pusat Perumusan Standar (PPS) mempunyai tugas dan fungsi untuk menjamin bahwa dalam pengembangan SNI, seluruh Komite Teknis/Sub Komite Teknis (Komtek/SubKomtek) dan para pemangku kepentingan yang terkait senantiasa taat azas dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Pedoman Standardisasi Nasional (PSN).

Istilah Komite Teknis merupakan amanah dari UU Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, yang menggantikan istilah Panitia Teknis (PT) Perumusan SNI. Selanjutnya Komite Teknis/Sub Komite Teknis disingkat dengan Komtek/SubKomtek.

SNI harus tersedia sesuai kebutuhan pasar dan mampu menjadi *tool* untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia dan dapat memberikan manfaat bagi pelaku usaha serta dapat melindungi masyarakat Indonesia terkait aspek keamanan, kesehatan, keselamatan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup (K3L) . Hal tersebut telah menjadi cita-cita BSN sebagai lembaga standardisasi. Oleh karena itu, peran PPS menjadi sangat penting sebagai pilar utama dalam mewujudkan ketersediaan SNI yang taat azas dan ketentuan yang berlaku, serta sesuai kebutuhan para pemangku kepentingan, sehingga tingkat kinerja PPS akan sangat berpengaruh secara signifikan dalam menjamin ketersediaan SNI di Indonesia.

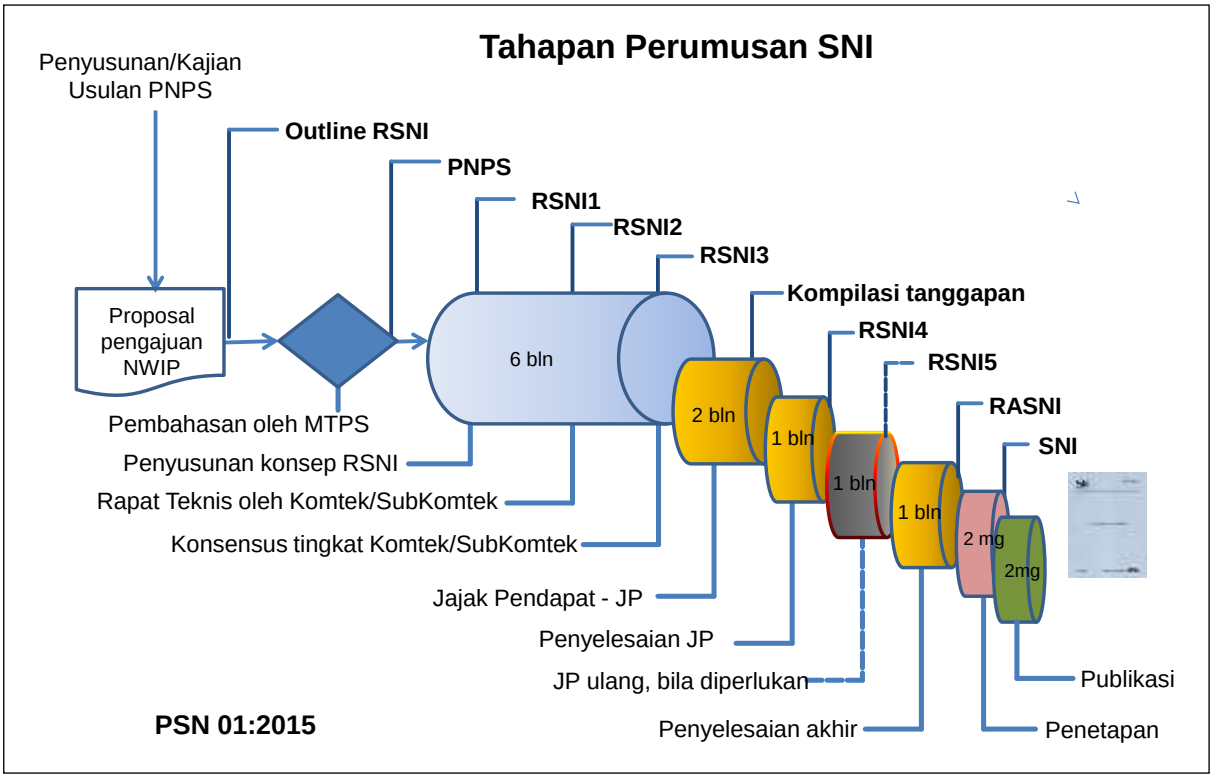

Gambar 3 – Tahapan Perumusan SNI sesuai dengan PSN 01:2015

Sebagai salah satu unit kerja dari Kedeputian PKS, Pusat Perumusan Standar (PPS) mempunyai tugas dan fungsi untuk menjamin bahwa dalam pengembangan SNI, seluruh

Komite Teknis/Sub Komite Teknis (Komtek/SubKomtek) dan para pemangku kepentingan yang terkait senantiasa taat azas dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Pedoman Standardisasi Nasional (PSN).

Istilah Komite Teknis merupakan amanah dari UU Nomor 20. Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, yang menggantikan istilah Panitia Teknis (PT) Perumusan SNI. Selanjutnya Komite Teknis/Sub Komite Teknis disingkat dengan Komtek/SubKomtek.

PSN yang telah ada sampai saat ini yang menjadi acuan dalam pengembangan SNI adalah :

- **PSN 01:2007** ***Pengembangan Standar Nasional Indonesia***
  menguraikan tentang tata cara pengembangan SNI, meliputi tata cara perumusan SNI mulai dari pengusulan Program Nasional Perumusan SNI (PNPS), pelaksanaan rapat teknis dan rapat konsensus Komtek/SubKomtek, jajak pendapat, penetapan dan publikasi, serta tata cara kaji ulang dalam rangka pemeliharaan SNI.

  (**CATATAN**: PSN 01:2007 telah direvisi menjadi PSN 01:2015 yang efektif mulai berlaku terhitung tanggal 18 Desember 2016).

- **PSN 02:2007** ***Pengelolaan PT Perumusan SNI***
  menguraikan tentang kelembagaan Manajemen Teknis Pengembangan Standar (MTPS), pembentukan dan pembubaran Komtek/SubKomtek, tugas/tanggung jawab dan pengorganisasian Komtek/SubKomtek, dan pengelolaan sekretariat Komtek/ SubKomtek perumusan SNI.

- **PSN 03.1:2007** ***Adopsi standar internasional dan publikasi internasional lainnya - Bagian 1 : adopsi standar internasional menjadi SNI***,
  menguraikan tentang tatacara adopsi standar internasional, apa yang boleh/ tidak boleh berubah dalam adopsi identik atau modifikasi, klasifikasi standar sebagai identik/modifikasi/tidak ekivalen (IDT/MOD/NEQ).

- **PSN 03.2:2014** ***Adopsi standar internasional dan publikasi internasional lainnya - Bagian 2: adopsi non standar internasional menjadi SNI***,
  menguraikan tentang tatacara adopsi publikasi internasional non standar, apa yang boleh/ tidak boleh berubah dalam adopsi identik atau modifikasi, jenis publikasi internasional non standar yang dapat diadopsi menjadi SNI.

- **PSN 04:2006** ***Jajak pendapat dan pemungutan suara dalam rangka perumusan SNI***
  menguraikan tentang prosedur, tatacara pelaksanaan jajak pendapat dan pemungutan suara, cara perhitungan serta sarana pendukung yang diperlukan.

- **PSN 05:2006** ***Tenaga ahli standardisasi untuk pengendali mutu perumusan SNI***
  menguraikan tentang pengelolaan tenaga ahli pengendali mutu perumusan SNI (TAS QC) dalam mendukung perumusan SNI yang taat azas dan ketentuan; kriteria, tugas dan kewajiban TAS-QC.

- **PSN 06:2015** ***Tata cara penomoran Standar Nasional Indonesia***
  Menguraikan tata cara pemberian nomor sejak RSNI sampai ditetapkan menjadi SNI, namun tidak termasuk penomoran PSN.

  (**CATATAN**: PSN 06:2007 telah direvisi menjadi PSN 06:2015 berdasarkan Peraturan Kepala BSN No 9 tahun 2015 yang efektif mulai berlaku sejak diundangkan).

- **PSN 07:2012** ***Standardisasi dan kegiatan yang terkait – Istilah umum***
  menguraikan istilah di bidang standardisasi dan kegiatan yang terkait agar terdapat kesamaan pengertian dan konsistensi penggunaan dalam perumusan SNI.

- **PSN 08:2016** ***Penulisan SNI***
  menguraikan tentang tata cara penulisan SNI, struktur standar, mulai dari halaman sampul hingga halaman akhir, bagian dari struktur standar yang sifatnya wajib ada dalam penulisan rancangan SNI dan yang sifatnya opsional, sesuai kebutuhan.

  (**CATATAN**: PSN 08:2007 telah direvisi menjadi PSN 08:2016 berdasarkan Peraturan Kepala BSN No 4 tahun 2016 yang efektif mulai berlaku sejak diundangkan).

- **PSN 10:2012** ***Adopsi standar ASTM menjadi SNI,***
  menguraikan tentang tatacara adopsi standar ASTM international, apa yang boleh/ tidak boleh berubah dalam adopsi identik Standar ASTM.

PPS bertanggungjawab penuh dalam pengorganisasian, pengelolaan dan pembinaan terhadap seluruh sumber daya yang terlibat dalam pengembangan SNI, mulai dari seluruh staf yang ada di lingkungan PPS, konseptor Rancangan SNI (RSNI), editor RSNI, tenaga ahli pengendali mutu perumusan SNI, hingga sekretariat pengelolaan Komtek/SubKomtek perumusan SNI yang ada di berbagai Kementerian dan Lembaga Non Kementerian (K/LNK). Oleh karena itu penguatan koordinasi dan sinergi dengan K/LNK, yang dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan PPS, menjadi kunci keberhasilan pencapaian kinerja unit kerja PPS.

Pengelolaan Komtek/Sub Komtek dilingkungan PPS dibagi menurut masing-masing bidang di lingkungan PPS dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 2 – Pengelolaan Komtek/SubKomtek Perumusan SNI per bidang di PPS

No	Bidang di PPS	Organ perumusan SNI		Aktif	Dikelola BSN
		Komtek	SubKomtek		
1	Pertanian, Pangan dan Kesehatan	34	11	38	18
2	Mekanika, Elektroteknika dan Konstruksi	29	11	36	2
3	Kimia dan Pertambangan	22	1	22	1
4	Lingkungan dan Serbaneka	31	2	25	8
	Jumlah	**116**	**25**	**122**	**28**

CATATAN: Data SK Penetapan Komtek/Sub Komtek s/d 31 Desember 2016

Dengan demikian, sebaran distribusi pengelolaan Komtek/Sub Komtek oleh masing-masing bidang di lingkungan PPS dapat dilihat pada Diagram 3 berikut:

Diagram 5 – Distribusi pengelolaan Komtek/Sub Komtek oleh bidang di lingkungan PPS

Selain itu PPS juga bertanggungjawab dalam menyusun konsep rancangan PSN yang baru/revisi PSN yang telah ada sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang terjadi dari referensi acuan internasional yang digunakan maupun karena tuntutan dan dinamika yang berkembang dari para pemangku kepentingan yang terkait di Indonesia.

Dengan demikian tersusunnya SNI yang bermutu dan sesuai kebutuhan para pemangku kepentingan serta selaras dengan rencana strategis BSN perlu ditunjang dengan program kerja dan pencapaian kinerja yang baik dari PPS selaku unit kerja yang mempunyai tanggung jawab dalam kegiatan perumusan SNI. Oleh karena itu, PPS mempunyai posisi strategis dalam mendukung pencapaian kinerja Kedeputian PKS dan kinerja kelembagaan BSN secara keseluruhan.

Dalam pelaksanaannya, program dan kegiatan rutin yang dilakukan oleh PPS meliputi penanganan hal-hal berikut:

1). Fasilitasi untuk pembahasan rekomendasi kebijakan bagi MTPS

- Usulan pembentukan/perubahan Komtek/SubKomtek Perumusan SNI;
- Usulan pembentukan/perubahan keanggotaan Komtek/SubKomtek;
- Usulan PNPS dari Komtek Perumusan SNI;
- Usulan pengembangan/revisi kebijakan perumusan SNI (PSN);
- Penyiapan topik lain sesuai kebutuhan dan perkembangan terkini.

2). Penyusunan konsep/revisi kebijakan perumusan SNI (PSN)

- Penyusunan konsep RPSN baru;
- Penyusunan konsep revisi PSN yang sudah ada;
- Pelaksanaan *Public hearing* RPSN/revisi PSN.

3). Fasilitasi untuk proses perumusan SNI

- Koordinasi permasalahan antar Komtek/SubKomtek Perumusan SNI;
- Verifikasi usulan PNPS dari Komtek Perumusan SNI;
- Verifikasi usulan pembentukan/perubahan Komtek/SubKomtek Perumusan SNI;
- Pengendalian proses perumusan SNI (rapat teknis dan rapat konsensus);
- Pemeliharaan SNI untuk kaji ulang bagi Komtek/SubKomtek Perumusan SNI;
- Pengembangan kerjasama dengan SDO (*Standard Development Organization*).

4). Pembinaan SDM perumusan SNI

- Pelaksanaan workshop konseptor perumus RSNI;
- Pelaksanaan workshop editor penulisan RSNI;
- Pelaksanaan workshop TAS-QC (rekrutmen dan refresmen);
- Pelaksanaan workshop pengembangan SNI unggulan daerah di Pemprov/Pemkot/ Pemkab;
- Mengirimkan instruktur untuk acara *in-house training* yang diselenggarakan Sekretariat Komtek/Sub Komtek Perumusan SNI yang dikelola oleh K/L.

5). Program peningkatan kinerja Komtek/SubKomtek perumusan SNI

- Pelaksanaan kunjungan lapangan dalam rangka evaluasi kinerja (evkin) Komtek/Sub Komtek;
- Pelaksanaan evkin Komtek/SubKomtek Perumusan SNI;
- Pelaksanaan seleksi nominasi penerima *Herudi Technical Committee Award* (HTCA);
- Penyelenggaraan acara *Herudi Technical Committee Award* (HTCA).

6). Fasilitasi harmonisasi SNI

- Pelaksanaan fasilitasi perumusan SNI yang harmonis dengan Standar Internasional;
- Menyusun rekomendasi kertas posisi Indonesia dalam harmonisasi standar pada pertemuan regional terkait harmonisasi standar ASEAN;
- Pemberian tanggapan terhadap draft standar internasional
- Pengiriman delegasi ke Standard Developer Organization (SDO) dalam rangka adopsi standar.

7). Pelaksanaan sistem manajemen mutu (SMM)

- Pemutakhiran data monitoring proses perumusan SNI per Komtek/SubKomtek;
- Konsistensi penggunaan form SMM dalam proses perumusan SNI;
- Pemutakhiran data informasi SISNI (Sistem Informasi SNI) terkait PNPS, pembentukan/perubahan Komtek/SubKomtek, penetapan keanggotaan/ perubahan keanggotaan Komtek/ SubKomtek, dll.

8). Tugas rutin dalam proses penetapan SNI

- Verifikasi dokumen RSNI3/4 yang diajukan oleh Komtek menjadi RASNI;
- Pemenuhan kelengkapan penetapan SNI (Pembuatan Memo usulan penetapan, Lampiran SK, Resume SNI dll);
- Pemutakhiran data status monitoring PNPS dan status data SNI per Komtek/SubKomtek sesuai SK penetapan.

9). Pelaksanaan kaji ulang SNI

- Identifikasi SNI yang perlu untuk dikaji ulang beserta identifikasi Komtek/Sub Komtek terkait sesuai dengan ruang lingkupnya;
- Koordinasi masalah antar Komtek/SubKomtek Perumusan SNI dalam pelaksanaan kaji ulang SNI;
- Verifikasi rekomendasi hasil kaji ulang SNI;
- Fasilitasi pelaksanaan kaji ulang SNI jika diperlukan;
- Pemenuhan kelengkapan penetapan rekomendasi hasil kaji ulang SNI (tetap dan abolisi) (Pembuatan Memo usulan penetapan, Lampiran SK, dll).

1.2 Isu-isu Strategis

Mengacu pada sumber daya manusia yang dimiliki oleh Pusat Perumusan Standar, dimana sampai dengan Desember 2016 berjumlah 44 (empat puluh empat) orang, maka modal strategis yang telah ada saat ini meliputi hal-hal berikut:

- komposisi pegawai menurut jenis kelamin dalam kondisi hampir berimbang, yaitu 25 orang pria dan 19 orang wanita;
- komposisi pegawai menurut rentang usianya saat ini paling banyak berada berusia produktif, yaitu 39 orang berusia antara 21 tahun s/d 40 tahun;
- berdasarkan latar belakang pendidikan, maka mayoritas pegawai PPS memiliki latar belakang pendidikan sarjana, yaitu 35 orang;
- berdasarkan status golongan ruang jabatan yang dimiliki oleh masing-masing pegawai pada saat ini, mayoritas merupakan pegawai dengan golongan III (37 orang).

Terkait alokasi anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan PPS pada tahun 2016, telah dialokasikan dari MAK 084.01.06 Program Pengembangan Standardisasi Nasional, pada Sub Program Perumusan Standar sejumlah Rp. 5.183.795.000,- (lima milyar seratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian masing-masing kegiatan menurut output yang ada di PPS adalah sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 3 – Pagu anggaran DIPA PPS tahun 2016

Output	Nama Kegiatan / MAK	Pagu anggaran (Rupiah)
001	Perumusan kebijakan pengembangan standar	526,623,000
002	Pengendalian proses perumusan SNI	2,613,343,000
003	Pembinaan Sumber Daya Manusia Perumusan SNI	576,691,000
004	Peningkatan Kinerja Komtek/SubKomtek	37,925,000
005	Fasilitasi perumusan dan kaji ulang SNI	1,429,213,000
	J u m l a h	**5,183,795,000**

Setelah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesesuaian ditetapkan pada tanggal 17 September 2014, penyediaan Standar Nasional Indonesia (SNI) sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan harus menjadi prioritas utama. Penyediaan SNI tersebut harus selaras dengan tujuan utama standardisasi di Indonesia

untuk periode 2015-2019 yaitu: 1) Melindungi kepentingan publik dan lingkungan, 2) Meningkatkan kepercayaan atas produk nasional di pasar domestik, dan 3) Membuka akses produk domestik ke pasar global.

Oleh karena itu SNI harus tersedia sesuai dengan kebutuhan pasar atau kebutuhan para pemangku kepentingan dan harus mampu menjadi *tool* untuk dapat melindungi masyarakat Indonesia terkait aspek keamanan, kesehatan, keselamatan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup (K3L) serta untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia. Hal tersebut telah menjadi cita-cita BSN sebagai lembaga pembina standardisasi di Indonesia. Keberadaan unit kerja PPS menjadi sangat penting sebagai pendukung pilar utama dalam penyusunan kebijakan untuk mewujudkan ketersediaan SNI yang sesuai kebutuhan para pemangku kepentingan, sehingga kinerja PPS akan sangat mempengaruhi maju tidaknya perkembangan standardisasi, khususnya terkait penyediaan SNI di Indonesia.

Dalam upaya mewujudkan tujuan utama standardisasi yaitu melindungi masyarakat terkait dengan kesehatan, keselamatan, keamanan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup, maka harus tersedia SNI yang diperlukan dalam pencapaian tujuan tersebut melalui pemberlakuan secara wajib di dalam regulasi teknis. Oleh karena program pengembangan SNI secara nasional yang menjadi salah satu prioritas kegiatan Deputi PKS difokuskan pada kebutuhan-kebutuhan SNI yang diperlukan untuk penyusunan regulasi teknis oleh Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, yang dengan demikian menuntut kinerja PPS harus mampu mendukung pencapaian prioritas kegiatan tersebut.

Hasil-hasil yang telah dicapai oleh PPS pada periode 2010–2015 dalam mengemban tanggung jawab pelaksanaan tugas pengembangan SNI dapat dipandang sebagai modal yang dapat digunakan oleh PPS untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya selama periode 5 tahun ke depan dalam rangka memberi kontribusi nyata untuk mewujudkan visi dan misi BSN 2015-2019.

Selain itu, adanya komitmen di kawasan ASEAN untuk mengharmonisasikan standar nasional masing-masing negara anggotanya, menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh PPS yang harus diselesaikan. Sebagaimana diketahui, seluruh negara ASEAN telah menyepakati integrasi perdagangan untuk 12 sektor prioritas ASEAN, dimana 6 sektor diantaranya memerlukan tersedianya standar yang harmonis, yaitu produk otomotif: produk berbasis kayu: produk berbasis karet; produk elektronika dan peralatan kelistrikan; produk makanan siap saji; dan produk perawatan kesehatan (obat dan obat tradisional, kosmetik dan alat kesehatan). Dari ke 6 sektor tersebut ASEAN sepakat untuk mengharmonisasikan 270 standar.

Sebagai salah satu unit kerja BSN yang terkait dengan pelayanan publik, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, maka PPS harus turut berkontribusi dalam memberikan kinerja yang prima dalam setiap tahapan proses perumusan SNI untuk seluruh pemangku kepentingan yang terlibat di dalamnya.

Dalam rangka mewujudkan tujuan utama BSN, khususnya terkait dengan aspek pengembangan SNI terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi, antara lain:

a. Setelah disahkannya UU Nomor 20 tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, menuntut perlunya penyesuaian/revisi seluruh kebijakan dan ketentuan yang ada di semua PSN terkait perumusan SNI;
b. Target waktu proses perumusan hingga RASNI (11 bulan) oleh Komtek/SubKomtek pada tahun 2015 baru tercapai 28,79 %, sehingga diperlukan penguatan pengelolaan kesekretariatan dan evaluasi kinerja KomiteTeknis/Sub Komite Teknis, antara lain melalui kegiatan pendampingan dalam proses perumusan SNI secara berkelanjutan;
c. Tersedianya dukungan ketersediaan SDM di Pusat Perumusan Standar masih perlu disertai dengan peningkatan kompetensi SDM tersebut dalam rangka percepatan penguatan dan peningkatan kinerja PPS, masih terdapat SDM yang tersebar di berbagai K/L yang bertindak sebagai sekretariat KomiteTeknis/Sub Komite Teknis yang belum memahami ketentuan PSN perumusan SNI karena SDM sebelumnya telah mengalami rotasi/promosi, sehingga program penguatan kompetensi SDM perumusan SNI perlu terus dilakukan secara konsisten;
d. Pemenuhan amanat UU Nomor 20/2014 untuk mendorong pengembangan SNI produk unggulan daerah, sehingga diperlukan penguatan kegiatan pembinaan SDM daerah dalam mengembangkan rancangan SNI produk unggulan/potensi daerah;
e. Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN mulai 1 Januari 2016 menuntut dukungan fasilitasi harmonisasi SNI dengan standar internasional yang relevan pada sektor prioritas ASEAN, termasuk pemberian dukungan fasilitasi alih bahasa/penterjemahan SNI yang telah ada dari hasil adopsi dengan metode republikasi-*reprint*;
f. Pengelolaan sekretariat Komite Teknis/Sub Komite Teknis saat ini ditangani oleh BSN dan berbagai K/L, sehingga memerlukan penyediaan fasilitasi perumusan SNI baik dalam rangka pemenuhan komitmen harmonisasi standar di kawasan ASEAN maupun untuk keperluan mendesak dalam rangka regulasi teknis berbasis SNI.
g. Status SNI yang tersedia pada saat ini, masih banyak SNI yang usianya di atas 5 (lima) tahun, sehingga diperlukan penguatan program pemeliharaan SNI bagi KomiteTeknis/Sub Komite Teknis, khususnya melalui penyediaan dukungan BSN dengan fasilitasi untuk kegiatan kaji ulang SNI.

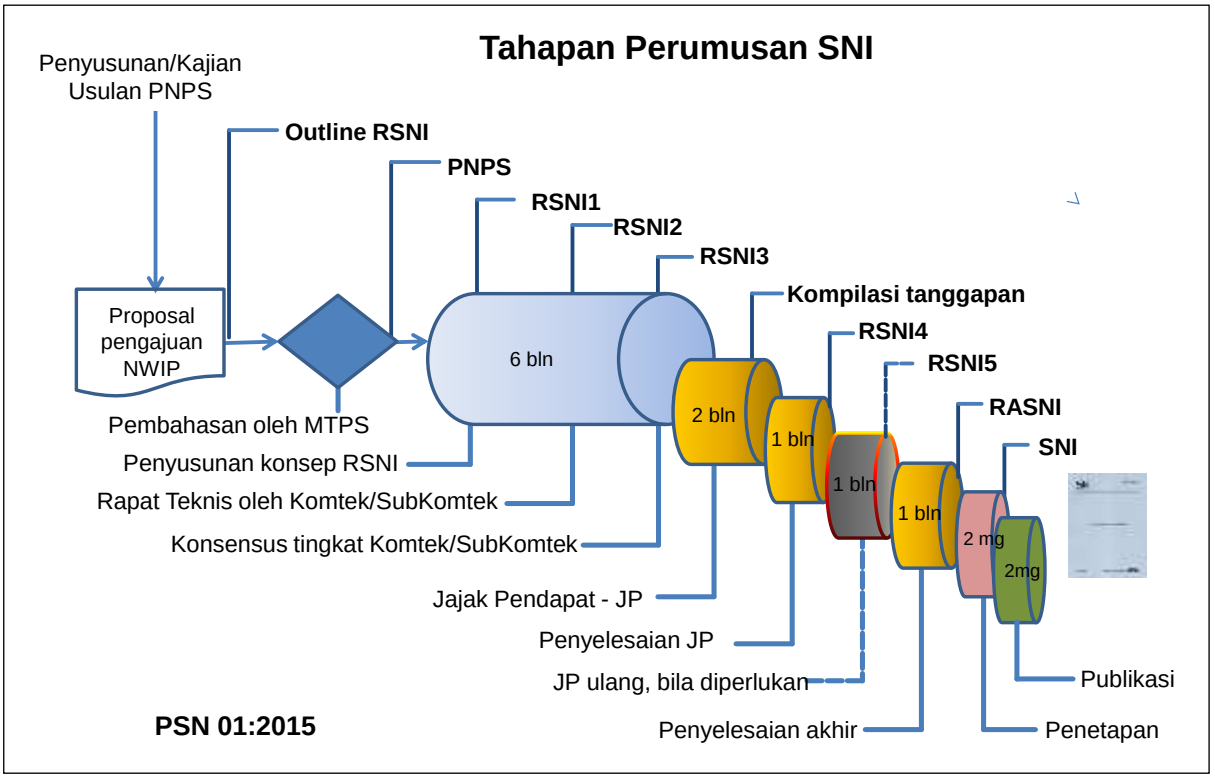

Gambar 4 – Tahapan Perumusan SNI sesuai dengan PSN 01:2015

Dalam rangka mewujudkan tujuan utama BSN, khususnya terkait dengan aspek pengembangan SNI terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi, antara lain:

h. Setelah disahkannya UU Nomor 20 tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, menuntut perlunya penyesuaian/revisi seluruh kebijakan dan ketentuan yang ada di semua PSN terkait perumusan SNI;

i. Target *Quick win* dalam proses perumusan SNI sampai dengan tahap RASNI (11 bulan) oleh Komtek/SubKomtek pada tahun 2015 baru tercapai 28,79 % dari target 30 %, sehingga diperlukan penguatan pengelolaan kesekretariatan dan evaluasi kinerja KomiteTeknis/Sub Komite Teknis, antara lain melalui kegiatan pendampingan dalam proses perumusan SNI secara berkelanjutan;

j. Tersedianya dukungan ketersediaan SDM di Pusat Perumusan Standar masih perlu disertai dengan peningkatan kompetensi SDM tersebut dalam rangka percepatan penguatan dan peningkatan kinerja PPS, masih terdapat SDM yang tersebar di berbagai K/L yang bertindak sebagai sekretariat KomiteTeknis/Sub Komite Teknis yang belum memahami ketentuan PSN perumusan SNI karena SDM sebelumnya telah mengalami rotasi/promosi, sehingga program penguatan kompetensi SDM perumusan SNI perlu terus dilakukan secara konsisten;

k. Pemenuhan amanat UU Nomor 20/2014 untuk mendorong pengembangan SNI produk unggulan daerah, sehingga diperlukan penguatan kegiatan pembinaan SDM daerah dalam mengembangkan rancangan SNI produk unggulan/potensi daerah;

l. Pengelolaan sekretariat Komite Teknis/Sub Komite Teknis saat ini ditangani oleh BSN dan berbagai K/L, sehingga memerlukan penyediaan fasilitasi perumusan SNI baik dalam rangka

pemenuhan komitmen harmonisasi standar di kawasan ASEAN maupun untuk keperluan mendesak dalam rangka regulasi teknis berbasis SNI.

m. Status SNI yang tersedia pada saat ini, masih banyak SNI yang usianya di atas 5 (lima) tahun, sehingga diperlukan penguatan program pemeliharaan SNI bagi KomiteTeknis/Sub Komite Teknis, khususnya melalui penyediaan dukungan BSN dengan fasilitasi untuk kegiatan kaji ulang SNI.

BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Umum

Mengacu pada Organisasi dan Tata Kerja BSN (Kep. Ka.BSN No.965/BSN-I/HK.35/05/2001, yang kemudian diubah beberapa kali) Pusat Perumusan Standar - BSN mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi program dan penyusunan rencana di bidang pengembangan sistem perumusan, perumusan dan evaluasi Standar Nasional Indonesia, serta menyusun pedoman di bidang Metrologi teknik, Standar dan evaluasi Uji dan Kualitas (MSUK), dan pemberian tanggapan terhadap konsep standar baik secara bilateral, regional maupun international.

Mengacu pada Undang-Undang (UU) nomor 20 tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, dimana kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian terdiri dari 3 elemen utama yaitu standar, penilaian kesesuaian dan ketertelusuran pengukuran yang berkaitan dengan barang, jasa, proses, sistem, dan personal, maka tugas dan fungsi PPS adalah memberikan dukungan pada pelaksanaan elemen standar, sebagaimana digambarkan dalam alur proses Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian yang terdapat pada Gambar 4.

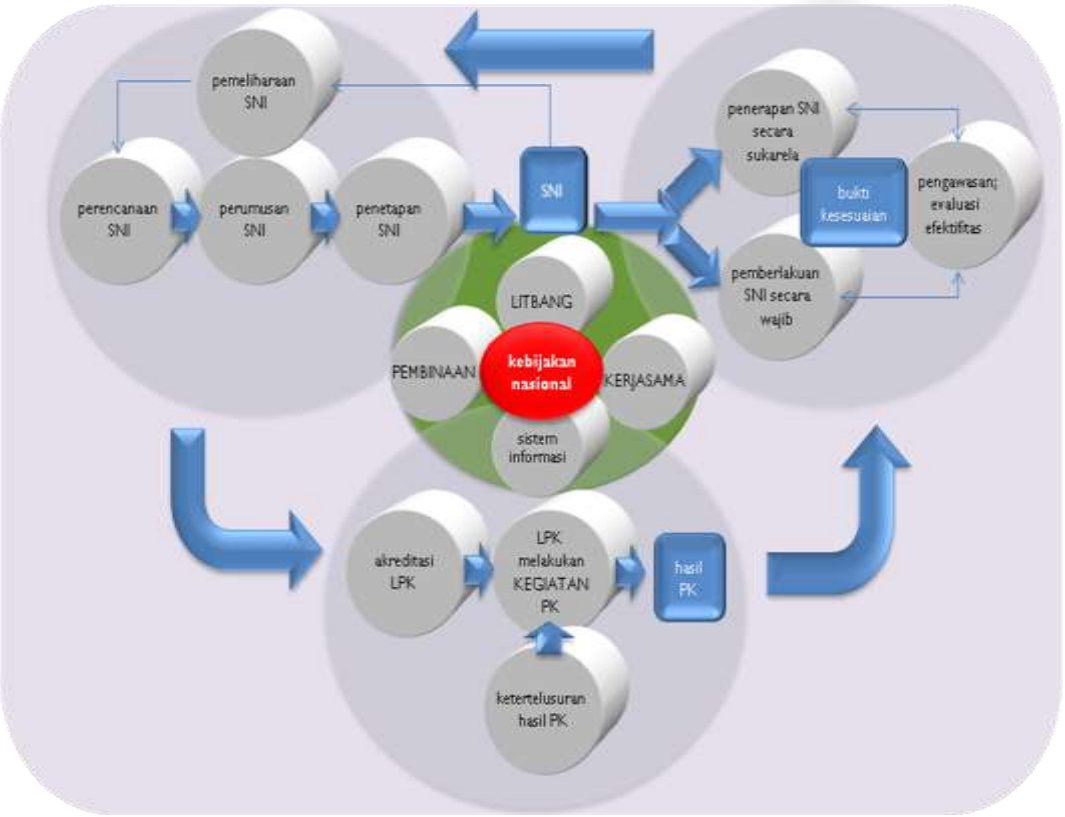

Gambar 5 – Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian dalam UU No. 20 Tahun 2014

Saat ini organisasi BSN terdiri dari: (1) Kepala; (2) Sekretariat Utama; (3) Deputi Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi; (4) Deputi Bidang Penelitian dan Kerja Sama Standardisasi; dan (5) Deputi Bidang Informasi dan Pemasyarakatan Standardisasi, dimana Pusat Perumusan Standar merupakan salah satu unit kerja setingkat eselon II yang berada dibawah koordinasi dari Deputi Bidang Penelitian dan Kerjasama Standardisasi (Deputi PKS).

Mengacu pada Organisasi dan Tata Kerja BSN (Kep. Ka.BSN No.965/BSN-I/HK.35/05/2001, yang kemudian diubah beberapa kali) PPS-BSN mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi program dan penyusunan rencana di bidang pengembangan sistem perumusan, perumusan dan evaluasi Standar Nasional Indonesia, serta menyusun pedoman di bidang Metrologi teknik, Standar dan evaluasi Uji dan Kualitas (MSUK), dan pemberian tanggapan terhadap konsep standar baik secara bilateral, regional maupun international.

Dalam organisasi Kedeputian PKS, PPS berperan sebagai pilar utama dalam pelaksanaan program pengembangan standar, dimana dalam operasional hariannya didukung oleh empat bidang yang ada. Fungsi-fungsi unit kerja yang ada di lingkungan PPS merupakan unit operasional untuk mendukung implementasi kebijakan pengembangan standar nasional dan program strategis BSN lainnya. Menurut PP 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional, yang kemudian diperkuat dengan UU No.20 tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, standar nasional yang dikembangkan Indonesia dikenal dengan nama Standar Nasional Indonesia (SNI), dan dinyatakan sebagai satu-satunya standar yang berlaku di seluruh Indonesia.

SNI harus tersedia sesuai kebutuhan pasar dan mampu menjadi *tool* untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia dan dapat memberikan manfaat bagi pelaku usaha serta dapat melindungi masyarakat Indonesia terkait aspek keamanan, kesehatan, keselamatan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup (K3L) . Hal tersebut telah menjadi cita-cita BSN sebagai lembaga standardisasi. Oleh karena itu, peran PPS, termasuk didalamnya bidang Mekanika, Elektroteknika dan Konstruksi, menjadi sangat penting sebagai pilar utama dalam mewujudkan ketersediaan SNI yang taat azas dan ketentuan yang berlaku, serta sesuai kebutuhan para pemangku kepentingan, sehingga tingkat kinerja PPS pada umumnya, dan bidang Mekanika, Elektroteknika dan Konstruksi pada khususnya, akan sangat berpengaruh secara signifikan dalam menjamin ketersediaan SNI di Indonesia.

2.2 Rencana Strategis PPS 2015-2019

Menyelaraskan Visi BSN tahun 2015-2019 yaitu : “Terwujudnya infrastruktur mutu nasional yang handal untuk meningkatkan daya saing dan kualitas hidup bangsa”, dan Visi Deputi Bidang Penelitian dan Kerjasama – BSN tahun 2015-2019 yaitu: "Terwujudnya SNI yang Berkualitas dan Bermanfaat Bagi Pemangku Kepentingan”, serta tantangan yang dihadapi dalam perumusan SNI, maka PPS menetapkan Visi tahun 2015-2019 yaitu:

"Terwujudnya proses Perumusan SNI yang taat azas dan tepat waktu"

Sejalan dengan visi tersebut di atas, maka misi Pusat Perumusan Standar adalah:

- Mengembangkan dan memperkuat sistem pengembangan SNI;
- Menyempurnakan kebijakan pengembangan SNI;
- Melaksanakan pengelolaan komtek/subkomtek pengembangan SNI;
- Melaksanakan pembinaan komtek/subkomtek dan personel terkait dengan pengembangan SNI;
- Memfasilitasi proses pengembangan SNI secara taat azas.

Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan Badan Standardisasi Nasional di antaranya adalah menjamin digunakannya infrastruktur mutu yang handal, dan tujuan Deputi bidang Penelitian dan Kerjasama Standardisasi, di antaranya adalah tersedianya Standar Nasional Indonesia (SNI) yang berkualitas dan bermanfaat bagi pemangku kepentingan, maka sesuai dengan visi, misi, tugas pokok, dan fungsi PPS, maka tujuan yang ingin dicapai oleh PPS adalah : "**Jumlah RASNI yang siap ditetapkan sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan**".

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, PPS menentukan sasaran strategis dan indikator kinerja utama dengan target yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun ke depan. Agar dapat diukur capaiannya maka dibuat target yang harus terukur dalam jangka waktu lima tahun ke depan.

Sasaran strategis, indikator dan target yang direncanakan untuk dicapai oleh PPS dalam kurun waktu tahun 2015-2019 dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4 – Sasaran Strategis PPS Tahun 2015-2019

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					
		2015	2016	2017	2018	2019	Satuan
Customer Perspectives							
1 Meningkatnya kapasitas dan kualitas SNI	1 Jumlah SNI yang difasilitasi pengembangannya	1070	100	150	200	250	SNI
	2 Persentase penyelesaian PNPS hingga RASNI tepat waktu	30	30	40	45	50	%
Internal Process Perspectives							
2 Terwujudnya kebijakan pengembangan SNI yang sesuai kebutuhan nasional	3 Jumlah rekomendasi terkait Komite Teknis perumusan SNI	25	30	35	40	50	rekomendasi

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET					
				2015	2016	2017	2018	2019	Satuan
		4	Jumlah rekomendasi persetujuan usulan Program Nasional Perumusan Standar (PNPS)	400	450	500	550	600	rekomendasi
		5	Jumlah rancangan Pedoman Standardisasi Nasional (PSN) terkait pengembangan SNI	2	2	2	2	2	rancangan
3	Terwujudnya RASNI yang siap ditetapkan yang telah memenuhi ketentuan PSN	6	Jumlah SNI yang siap ditetapkan	350	450	500	500	500	RASNI
		7	Jumlah Sekretariat Komtek Perumusan SNI dikelola oleh BSN	10	15	25	30	35	sekretariat Komtek
4	Meningkatnya kualitas SDM perumusan standar	8	Jumlah sumber daya perumusan standar yang meningkat kompetensinya	550	550	575	600	625	orang
5	Meningkatnya kualitas Komtek/ Subkomtek perumusan standar	9	Jumlah Komtek/SubKomtek yang telah memenuhi kriteria penilaian evaluasi kinerja	45	50	55	60	65	Komtek/ SubKomtek
		10	Persentase Komtek/ SubKomtek perumusan SNI yang dievaluasi kinerjanya	100	100	100	100	100	%
6	Terwujudnya fasilitasi program perumusan SNI	11	Jumlah SNI yang dikaji ulang	1000	100*	100	100	100	kaji ulang
		12	Jumlah fasilitasi perumusan RSNI	70	100	100	100	100	RSNI
		13	Jumlah fasilitasi penterjemahan dokumen SNI/SI yang digunakan sebagai RSNI	141	40*	40	40	40	RSNI

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					
		2015	2016	2017	2018	2019	Satuan
7 Terwujudnya pengembangan SNI yang koheren dengan perkembangan standar internasional	14 Jumlah dokumen rekomendasi kertas posisi Indonesia terkait harmonisasi standar dalam forum kerjasama standardisasi regional/multilateral	0	12	12	12	12	rekomendasi posisi Indonesia
	15 Persentase tanggapan Indonesia dalam forum pengembang standar internasional	0	70	80	90	100	%
	16 Persentase fasilitasi perumusan standar yang mengadopsi publikasi dari SDO	100	100	100	100	100	%
Learning and Growth Perspectives							
8 Meningkatnya kinerja sistem pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, tata kelola dan organisasi PPS yang profesional	17 Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) PPS yang meningkat kompetensinya	100	100	100	100	100	%
	18 Realisasi anggaran PPS	≥95	≥95	≥95	≥95	≥95	%
	19 Jumlah *e-governance* yang mendukung tata kelola PPS	0	0	0	0	0	Aplikasi

*) jumlah menjadi 0 karena adanya pemotongan anggaran
**) jumlah menjadi 3 karena adanya pemotongan anggaran

2.3 Kebijakan BSN

2.3.1 Kebijakan umum

Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, pada dasarnya arah kebijakan PPS dapat dikelompokkan ke dalam 5 arah kebijakan yaitu:

1. Penyusunan rekomendasi kebijakan perumusan standar;
2. Penyusunan RASNI yang siap ditetapkan menjadi SNI;
3. Peningkatan kompetensi sumberdaya perumusan standar;
4. Peningkatan jumlah Komtek/Sub Komtek yang memenuhi ketentuan PSN;

5. Penyusunan RSNI yang difasilitasi perumusannya dan harmonis dengan standar internasional.

Kebijakan 1: Penyusunan rekomendasi kebijakan perumusan standar

Kebijakan perumusan standar yang konsisten dengan tantangan yang dihadapi sangat dibutuhkan untuk memastikan tersedianya SNI yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan sehingga mampu mendukung terwujudnya infrastruktur mutu yang handal secara nasional. Oleh karena itu perumusan standar difokuskan dengan kegiatan antara lain : (1) peningkatan mutu dan kualitas SNI melalui penguatan sistem pengembangan SNI dan (2) perumusan SNI yang difokuskan pada persyaratan-persyaratan yang diperlukan untuk memastikan perlindungan kepentingan publik dan lingkungan, pemenuhan terhadap kesepakatan harmonisasi di tingkat ASEAN, persyaratan minimal bagi produk terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah, dan persyaratan yang memuat nilai tambah bagi produk nasional sesuai kebutuhan dan karakteristik bangsa Indonesia, serta mampu memperoleh kepercayaan di pasar domestik.

Dilaksanakan dalam rangka menyiapkan rekomendasi kepada Kepala BSN, dengan melalui beberapa kegiatan dengan dua kebijakan sebagai output utama, yaitu:

a. Rekomendasi kebijakan terkait pelaksanaan proses perumusan SNI.

Rekomendasi kebijakan ini disusun berdasarkan konsolidasi dari hasil:

1). Pembahasan usulan kebijakan dalam proses pengembangan SNI;
2). Pembahasan usulan pembentukan/perubahan Komite Teknis dan Sub Komite Teknis Perumus SNI;
3). Pembahasan usulan penambahan/perubahan ruang lingkup Komtek/Sub Komtek Perumus SNI;
4). Pembahasan pembubaran/penggabungan Komtek/Sub Komtek Perumus SNI,
5). Pembahasan usulan perubahan keanggotaan Komtek/Sub Komtek Perumus SNI;
6). Pembahasan usulan PNPS, baik yang merupakan PNPS judul baru, PNPS perpanjangan, PNPS terjemahan, PNPS revisi, atau pembatalan PNPS dengan alasan tertentu.

b. Penyusunan rancangan kebijakan dalam bentuk Pedoman Standardisasi Nasional (PSN).

Penyusunan rekomendasi perubahan/pembuatan PSN dimaksudkan agar PSN yang telah dan akan digunakan sebagai acuan bagi para pemangku kepentingan dalam pengembangan SNI telah sesuai dengan tuntutan perkembangan yang ada. Kegiatannya meliputi penyusunan rancangan PSN oleh konseptor, pembahasan internal PPS dan BSN, hingga pelaksanaan *Public Hearing* RPSN dengan para pemangku kepentingan yang terkait.

Kebijakan 2: Penyusunan RASNI yang siap ditetapkan menjadi SNI

Dilaksanakan dalam rangka menjamin proses perumusan SNI secara taat azas dan ketentuan yang berlaku sesuai dengan PSN terkait pengembangan SNI, agar tercapai output utama: jumlah RASNI sesuai target. Kegiatan dilaksanakan dengan melalui tiga kegiatan utama yang terdiri dari:

1). Koordinasi penyelesaian permasalahan Komtek/SubKomtek

Pusat Perumusan Standar memfasilitasi penyelesaian masalah Komtek/ SubKomtek terkait duplikasi PNPS, komposisi keanggotaan Komtek/Sub Komtek, pembagian ruang lingkup antar Komtek, penetapan SNI dan permasalahan lain sesuai kebutuhan, termasuk koordinasi tindak lanjut keputusan MTPS yang harus segera diselesaikan.

2). Pengendalian perumusan SNI

BSN mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa prosedur dan ketentuan yang terdapat dalam PSN pengembangan SNI diikuti oleh Komite Teknis/ Sub Komite Teknis dalam setiap proses perumusan SNI. Pengendalian ini dilakukan dengan menugaskan Staf PPS dan/atau Tenaga Pengendali Mutu Perumusan SNI.

3). Pemeliharaan SNI

Komite Teknis/ Sub Komite Teknis berkewajiban memelihara SNI yang termasuk dalam ruang lingkupnya dengan melalui pelaksanaan kaji ulang sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun setelah ditetapkan. Kaji ulang ini bertujuan untuk menjaga kesesuaian SNI terhadap kebutuhan pasar dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga SNI yang dipublikasikan terjamin kelayakan dan kekiniannya. Pusat Perumusan Standar juga mempunyai kewajiban untuk mengingatkan Komite Teknis/ Sub Komite Teknis untuk melakukan pemeliharaan dengan cara mengelompokkan SNI yang perlu untuk dikaji ulang, dan memberikan dukungan fasilitasi kaji ulang apabila diperlukan.

Kebijakan 3 : Peningkatan kompetensi sumberdaya perumusan standar

Dilaksanakan dalam rangka menjamin kompetensi seluruh sumberdaya manusia yang terlibat dalam proses perumusan SNI mampu mendukung terwujudnya SNI yang berkualitas dengan semangat *simpler, faster, better*, dengan melalui dua kegiatan utama untuk mencapai output : jumlah SDM perumusan SNI sesuai target, yang terdiri dari:

1). Penyusunan silabus pembinaan SDM perumusan SNI

Silabus yang perlu disusun antara lain :

- silabus pembinaan konseptor Rancangan SNI;
- silabus pembinaan editor RSNI; dan
- silabus pembinaan Tenaga Pengendali Mutu SNI,
- Silabus pembinaan komtek/subkomtek dan/atau sekretariat komtek/subkomtek.

2). Penyelenggaraan pembinaan SDM perumusan SNI

Dilaksanakan melalui penyelenggaraan workshop pembinaan SDM perumusan SNI yang terdiri dari :

(1). Pembinaan konseptor Rancangan SNI

Konseptor RSNI merupakan Gugus Kerja (GK) atau perorangan yang ditunjuk oleh Komtek/SubKomtek berdasarkan kesepakatan Komtek/SubKomtek untuk merumuskan RSNI, yang nantinya akan dibahas bersama para pakar dari produsen, konsumen, akademisi, maupun regulator, termasuk pakar lembaga penilaian

kesesuaian dalam suatu Komtek/SubKomtek. Para konseptor RSNI merupakan ujung tombak penyusunan RSNI, sehingga workshop konseptor sangat diperlukan dalam menfasilitasi ketersediaan SDM penyusun RSNI yang paham terhadap aturan adopsi dan bisa mengimplementasikan untuk mendukung harmonisasi standar.

(2). Pembinaan editor RSNI

Editor RSNI merupakan faktor penting untuk memastikan bahwa penulisan RSNI telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam PSN 08 tentang Penulisan SNI, sehingga SNI disusun secara seragam, konsisten dan mudah dimengerti dengan memperhatikan tampilan tanpa mempengaruhi isi teknisnya. Pembinaan editor RSNI dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan SDM dalam editing SNI, sehingga tersedia SDM yang kompeten dan bertanggung jawab atas kebenaran penulisan RSNI sesuai PSN yang relevan.

(3) Workshop Tenaga Pengendali Mutu SNI.

Tenaga pengendali mutu SNI merupakan personel yang ditugaskan BSN untuk memonitor jalannya rapat konsensus suatu RSNI, untuk memastikan agar rapat konsensus dilaksanakan sesuai dengan kaidah pengembangan SNI. Workshop Tenaga pengendali mutu SNI sangat diperlukan agar Tenaga pengendali mutu SNI memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai mekanisme perumusan dan penulisan SNI dan sarana tukar menukar pengalaman antar Tenaga pengendali mutu SNI.

(4) Pembinaan komtek/sub komtek dan sekretariat Komtek/Subkomtek

Anggota Komtek/Subkomtek dan secretariat Komtek/Subkomtek merupakan pelaksana pengembangan SNI, sehingga penting untuk dibina BSN, untuk menjamin proses pengembangan SNI telah dilaksanakan secara taat azas sesuai dengan ketentuan serta menghasilkan SNI yang bermanfaat bagi pemangku kepentingan di Indonesia.

(5) Pelatihan peningkatan kompetensi SDM Pusat Perumusan Standar.

Sebagai unit kerja utama yang bertanggungjawab terhadap pencapaian output utama BSN, maka SDM yang ada di lingkungan PPS perlu ditingkatkan pemahaman, kemampuan dan kompetensinya tentang berbagai aspek spesifik. Peningkatan pemahaman tentang sistem manajemen mutu, sistem penilaian kesesuaian, sertifikasi produk, dan lain-lain, diharapkan dapat mendukung unjuk kerja masing-masing personel PPS dalam kegiatan pengembangan SNI dan pada saat interaksi dengan Komtek/Sub Komtek.

Kebijakan 4 : Peningkatan jumlah Komtek/Sub Komtek yang memenuhi ketentuan PSN

Dilaksanakan dalam rangka menjamin kinerja Komtek/SubKomtek sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PSN, dengan output : jumlah Komtek/SubKomtek telah

memenuhi ketentuan Pedoman Standardisasi Nasional sesuai target, melalui dua kegiatan utama yang terdiri dari:

1). Evaluasi kinerja Komtek/SubKomtek

Evaluasi kinerja Komtek/SubKomtek dilakukan setiap tahun, yang bertujuan untuk mengevaluasi kinerja Komtek/SubKomtek berdasarkan ketentuan yang sudah ditetapkan dalam PSN terkait pengembangan SNI. Evaluasi kinerja Komtek/ SubKomtek dilaksanakan dengan melihat aspek pengelolaan kesekretariatan Komtek/SubKomtek dalam pengembangan SNI, waktu perumusan SNI, penyelesaian PNPS sampai dengan tahap konsensus, dan pemeliharaan SNI.

2). Penganugerahan HTCA (Herudi Technical Committee Award)

Badan Standardisasi Nasional (BSN) secara rutin setiap tahun memberikan penghargaan HTCA kepada Komite Teknis Perumusan SNI yang berkinerja terbaik sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan atas capaian kinerjanya. Acara anugerah tahunan HTCA juga diikuti dengan penyelenggaraan kegiatan Temu Komite Teknis Perumusan SNI dengan tema menyesuaikan acara tahunan Bulan Mutu Nasional. Proses penetapan nomine dan pemenang HTCA mengacu pada hasil evaluasi kinerja Komite Teknis dalam kurun waktu satu tahun sebelumnya.

Kebijakan 5 : Penyusunan SNI yang difasilitasi perumusannya

Dilaksanakan dalam rangka memenuhi komitmen Indonesia dalam perjanjian kerjasama baik regional maupun internasional terkait standardisasi (AFTA dan MEA 2015), khususnya untuk menyelaraskan standar nasional negara anggota dengan standar internasional yang disepakati, maupun dalam rangka mendukung program prioritas pemerintah terkait kebutuhan mendesak dalam pengembangan SNI, dengan output: jumlah RSNI yang difasilitasi perumusannya, baik dalam rangka harmonisasi dengan standar internasional maupun untuk mendukung kebutuhan pemangku kepentingan, misalnya penyusunan regulasi teknis berbasis penerapan SNI, melalui satu kegiatan utama dalam bentuk dukungan pendanaan dalam rapat teknis dan rapat konsensus kepada Komtek yang membutuhkan.

Manfaat dari penyelarasan/ harmonisasi standar antara lain akan meningkatkan kepercayaan pasar terhadap SNI; para pelaku usaha akan lebih mudah memasukkan produknya ke pasar internasional; meningkatkan keberterimaan produk yang bertanda SNI; memudahkan aliran produk yang bertanda SNI dari pabrik ke pasar; serta pengakuan terhada hasil proses pengujian dan sertifikasi.

Untuk memastikan keselarasan SNI dengan standar internasional, maka BSN perlu memantau perkembangan standar internasional serta berpartisipasi dalam perumusan standar internasional untuk produk/kegiatan yang menjadi prioritas nasional. Bentuk partisipasi berupa pemberian tanggapan terhadap ballot untuk rancangan standar internasional, atau ikut serta secara fisik dalam pertemuan komite teknis internasional dalam bedan standar internasional seperti ISO, IEC dan Codex.

Selain itu, BSN juga perlu memberikan rekomendasi kertas posisi Indonesia dalam forum regional, khususnya di ASEAN, dalam harmonisasi standar. Kertas posisi ini diperlukan agar kesepakatan regional dalam harmonisasi standar dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya dan tidak merugikan stakeholder nasional.

2.3.2 Program dan Kegiatan Unit Kerja

Untuk mencapai target SNI yang ditetapkan sesuai kebutuhan pasar pada tahun 2016 sejumlah 450, PPS telah melakukan beberapa tahapan yang meliputi kegiatan berikut:

1. Perumusan kebijakan pengembangan standar

Dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran Renstra no. 2 Terwujudnya kebijakan pengembangan SNI yang sesuai kebutuhan nasional. Adapun indikator kinerja yang diukur adalah :

a. Jumlah rekomendasi terkait Komite Teknis perumusan SNI (indikator kinerja no 3),
disusun berdasarkan konsolidasi dari hasil rekomendasi MTPS terkait:
   1). Pembahasan usulan pembentukan Komite Teknis dan Sub Komite Teknis baru,
   2). Pembahasan usulan penambahan ruang lingkup Komtek/SubKomtek,
   3). Pembahasan perubahan/pembubaran Komtek/SubKomtek,
   4). Pembahasan usulan perubahan keanggotaan Komtek/SubKomtek,

b. Jumlah rekomendasi persetujuan usulan Program Nasional Perumusan Standar (PNPS) (indikator kinerja no 4),
disusun berdasarkan konsolidasi dari hasil rekomendasi MTPS terkait persetujuan PNPS yang diajukan oleh Komtek/Sub Komtek yang meliputi:
   1). PNPS judul baru,
   2). PNPS perpanjangan,
   3). PNPS terjemahan,
   4). PNPS revisi/amandemen/ralat, dan
   5). pembatalan PNPS dengan alasan tertentu.

c. Jumlah rancangan Pedoman Standardisasi Nasional (PSN) terkait pengembangan SNI (indikator kinerja no 5),
disusun dengan maksud agar PSN yang telah dan akan digunakan sebagai acuan bagi para pemangku kepentingan dalam pengembangan SNI sesuai dengan tuntutan perkembangan yang ada. Kegiatannya meliputi:
   1). penyusunan konsep,
   2). pembahasan internal PPS,
   3). pelaksanaan *Public Hearing* RPSN dengan para pemangku kepentingan, dan
   4). finalisasi naskah akhir PSN untuk proses penetapan melalui Peraturan Kepala BSN.

Perumusan kebijakan oleh Kepala Badan Standardisasi Nasional terkait pengembangan standar dibantu oleh Manajemen Teknis Pengembangan Standar (MTPS). MTPS merupakan forum yang mempunyai tugas memberikan pertimbangan dan saran kepada Kepala

Badan Standardisasi Nasional (BSN) dalam rangka menetapkan kebijakan dan strategi untuk memperlancar pengelolaan kegiatan pengembangan Standar Nasional Indonesia (SNI) agar memberikan manfaat bagi pemangku kepentingan.

Adapun fungsi MTPS adalah sebagai berikut :

1). Memberikan rekomendasi terkait kebijakan pengembangan SNI dengan memperhatikan:
   a) Hasil kaji ulang SNI;
   b) Kebutuhan penyusunan regulasi teknis berbasis SNI;
   c) Kebutuhan dukungan infrastruktur standardisasi, khususnya terkait penyediaan SNI, dalam rangka kebijakan nasional yang ditetapkan pemerintah;
   d) Perkembangan kerjasama bilateral, regional yang terkait dengan perkembangan SNI;
   e) Kecenderungan perkembangan standardisasi di tingkat internasional;
   f) Kajian di bidang standardisasi yang perlu mendapatkan perhatian karena memiliki prospek yang penting dalam perkembangan perdagangan di dalam negeri dan internasional dengan memperhatikan aspek keselamatan, keamanan, kesehatan, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup;
   g) Program pengembangan standar internasional;
   h) Kemampuan Ilmu pengetahuan dan teknologi;
   i) Pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2). Memberikan rekomendasi terhadap rancangan Pedoman Standardisasi Nasional (PSN) yang berkaitan dengan pengembangan SNI dan Komite Teknis;

3). Memberikan rekomendasi terhadap usulan Program Nasional Pengembangan Standar (PNPS);

4). Memberikan rekomendasi terhadap usulan pembentukan/perubahan Komite Teknis/ Subkomite Teknis berdasarkan pembidangan *International Classification for Standard* (ICS) , kesekretariatan serta susunan keanggotaan Komite Teknis/ Subkomite Teknis;

5). Memberikan rekomendasi terhadap usulan dan tindak lanjut pembubaran/penggabungan Komite Teknis/ Subkomite Teknis berdasarkan pembidangan *International Classification for Standard* (ICS);

6). Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala BSN dan kegiatan lain yang diperlukan dalam rangka pengembangan SNI.

2. Pengendalian proses perumusan SNI hingga RASNI siap ditetapkan

Dilaksanakan dalam rangka mewujudkan sasaran Renstra no. 1 Meningkatnya kapasitas dan kualitas SNI, dan sasaran Renstra no. 3 Terwujudnya RASNI yang siap ditetapkan yang telah memenuhi ketentuan PSN. Hal ini untuk menjamin proses perumusan SNI secara taat azas dan ketentuan yang berlaku sesuai dengan PSN pengembangan SNI. Kegiatan dilaksanakan dengan indikator kinerja yang terdiri dari:

1). Persentase penyelesaian PNPS hingga RASNI tepat waktu (indikator kinerja no 2).

Untuk menjamin penyelesaian PNPS tepat waktu, Pusat Perumusan Standar memfasilitasi penyelesaian masalah antar Komtek/ SubKomtek terkait duplikasi PNPS, komposisi keanggotaan Komtek/Sub Komtek, pembagian ruang lingkup, penetapan SNI dan permasalahan lain sesuai kebutuhan, termasuk koordinasi tindak lanjut keputusan MTPS yang harus segera diselesaikan.

Untuk menjamin tercapainya penetapan SNI tepat waktu, Pusat Perumusan Standar melaksanakan monitoring proses perumusan SNI, dari pengajuan usulan PNPS, persetujuan PNPS, rapat pembahasan teknis dan konsensus, pelaksanaan jajak pendapat, verifikasi kelengkapan dokumen dan substansi Rancangan Akhir SNI, hingga pengajuan usulan penetapan.

2). Jumlah RASNI yang siap ditetapkan (indikator kinerja no. 6)

BSN mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa prosedur dan ketentuan yang terdapat dalam PSN pengembangan SNI diikuti oleh Komite Teknis/ Sub Komite Teknis dalam setiap proses perumusan SNI. Pengendalian ini dilakukan dengan menugaskan Petugas Pengendali Mutu Perumusan SNI (TAS-QC). Selain itu PPS juga melakukan verifikasi format penulisan dan substansi Rancangan Akhir SNI untuk pengajuan penetapan SNI.

3). Jumlah Sekretariat Komtek Perumusan SNI dikelola oleh BSN (indikator kinerja no. 7).

Untuk menindaklanjuti amanat UU No.20/2014 tentang SPK, khususnya terkait pengembangan SNI, serta untuk menghindari ketergantungan dengan K/L lain, maka pengelolaan sekretariat Komtek/Sub Komtek perumusan SNI oleh BSN perlu ditingkatkan terus menerus setiap tahun. Kebijakan ini diterapkan, sepanjang memungkinkan, terhadap Komtek/Sub Komtek yang baru dibentuk, Komtek/Sub Komtek yang diaktifkan kembali, Komtek/Sub Komtek yang ruang lingkupnya terkait beberapa K/L, dan Komtek/Sub Komtek yang dilimpahkan pengelolaanya ke BSN.

Dalam hal Sekretariat Komtek/Subkomtek di BSN, maka BSN berkewajiban memfasilitasi kegiatan Komtek/Subkomtek dari identifikasi usulan SNI baru, pengusulan, perumusan, hingga pemeliharaan SNI.

3. Pembinaan Sumber Daya Manusia Perumusan SNI

Dilaksanakan dalam rangka mewujudkan sasaran kinerja Nomor 4 Meningkatnya kualitas SDM perumusan standar, dan sasaran kinerja nomor 8 Meningkatnya kinerja sistem pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, tata kelola dan organisasi PPS yang profesional. Hal ini untuk menjamin kompetensi seluruh sumberdaya manusia yang terlibat dalam proses perumusan SNI mampu mendukung terwujudnya SNI yang berkualitas dengan semangat *simpler, faster, better*. Adapun indikator kinerja terdiri dari:

1). Jumlah sumber daya perumusan standar yang meningkat kompetensinya (indikator kinerja no. 8)

Kegiatan ini didukung dengan Silabus antara lain :

- silabus pembinaan konseptor Rancangan SNI;
- silabus pembinaan editor RSNI; dan
- silabus pembinaan Tenaga Ahli Standardisasi Pengendali Mutu SNI (TAS-QC),
- dokumen panduan tata urutan rapat konsensus yang dapat digunakan TAS-QC dalam memonitor jalannya rapat konsensus perumusan SNI.

Pengembangan kompetensi SDM perumusan standar dilaksanakan melalui penyelenggaraan workshop pembinaan SDM perumusan SNI yang terdiri dari :

(1). Pembinaan konseptor Rancangan SNI

Konseptor RSNI merupakan Gugus Kerja (GK) atau perorangan yang ditunjuk oleh Komtek/SubKomtek berdasarkan kesepakatan Komtek/SubKomtek untuk merumuskan RSNI, yang nantinya akan dibahas bersama para pakar dari produsen, konsumen, akademisi, maupun regulator, termasuk pakar lembaga penilaian kesesuaian dalam suatu Komtek/SubKomtek. Para konseptor RSNI merupakan ujung tombak penyusunan RSNI, sehingga workshop konseptor sangat diperlukan dalam menfasilitasi ketersediaan SDM penyusun RSNI yang paham terhadap aturan adopsi dan bisa mengimplementasikan untuk mendukung harmonisasi standar.

Pemahaman yang ingin dicapai dalam workshop ini meliputi:

- Pemahaman kebijakan pengembangan SNI;
- Pemahaman ketentuan pengembangan SNI (PSN 01);
- Pemahaman ketentuan adopsi standar internasional menjadi SNI (PSN 03.1);
- Pemahaman ketentuan adopsi publikasi internasional selain standar menjadi SNI (PSN 03.2);
- Pemahaman ketentuan adopsi standar *American Society for Testing and Materials (ASTM International);*
- Pemahaman pedoman terkait Aspek keselamatan – Pencantuman dalam standar (ISO/IEC Guide 51:1999);
- Pemahaman Pedoman untuk memperhatikan isu lingkungan dalam standar produk (ISO/IEC Guide 64:2008);
- Cara mengakses dokumen ISO, IEC, ASTM, SNI dan bagaimana cara mendapatkan dokumen acuan; dan
- Pemahaman penulisan SNI (PSN 08).

(2). Pembinaan editor RSNI

Editor RSNI merupakan faktor penting untuk memastikan bahwa penulisan RSNI telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam PSN 08 tentang Penulisan SNI, sehingga SNI disusun secara seragam, konsisten dan mudah dimengerti dengan memperhatikan tampilan tanpa mempengaruhi isi teknisnya. Pembinaan editor RSNI dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan SDM dalam editing SNI, sehingga tersedia SDM yang kompeten dan bertanggung jawab atas kebenaran penulisan RSNI sesuai PSN yang relevan. Pemahaman yang ingin dicapai meliputi:

- Pemahaman kebijakan pengembangan SNI;
- Pemahaman ketentuan pengembangan SNI (PSN 01);
- Pemahaman ketentuan adopsi standar internasional menjadi SNI (PSN 03.1);
- Pemahaman ketentuan adopsi publikasi internasional selain standar menjadi SNI (PSN 03.2);
- Pemahaman ketentuan adopsi standar *American Society for Testing and Materials (ASTM International);*
- Pemahaman penulisan SNI (PSN 08).

(3). Pemeliharaan kompetensi Tenaga Ahli Standardisasi Pengendali Mutu SNI (TAS-QC)

TAS-QC merupakan personel yang ditugaskan BSN untuk memonitor jalannya rapat konsensus suatu RSNI, untuk memastikan agar rapat konsensus dilaksanakan sesuai dengan kaidah pengembangan SNI. Workshop TAS-QC sangat diperlukan agar TAS-QC memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai mekanisme perumusan dan penulisan SNI dan sarana tukar menukar pengalaman antar TAS-QC.

Sasaran pemahaman yang ingin dicapai antara lain :

- Pemahaman Kebijakan Pengembangan SNI;
- Pemahaman ketentuan pengembangan SNI (PSN 01);
- Pemahaman ketentuan adopsi standar internasional menjadi SNI (PSN 03.1);
- Pemahaman ketentuan adopsi publikasi internasional selain standar menjadi SNI (PSN 03.2);
- Pemahaman ketentuan adopsi standar *American Society for Testing and Materials (ASTM International);*
- Pemahaman ketentuan PSN 05 tentang Tenaga Ahli Standardisasi terbaru;
- Pemahaman penulisan SNI (PSN 08);
- Informasi aktual (ketentuan baru terkait pengembangan SNI);
- Sharing informasi pengalaman dalam rapat konsensus (untuk refreshment TAS-QC);
- Simulasi (contoh) editing SNI dihubungkan dengan substansi SNI.

2) Persentase Aparatus Sipil Negara (ASN) PPS yang meningkat kompetensinya (indikator kinerja no. 17)

SDM yang ada di lingkungan PPS perlu ditingkatkan pemahaman, kemampuan dan kompetensinya tentang berbagai aspek spesifik dalam rangka untuk mendukung unjuk kerja masing-masing personel PPS dalam kegiatan pengembangan SNI dan pada saat interaksi dengan Komtek/Sub Komtek maupun pemangku kepentingan lainnya. Pelatihan untuk peningkatan pemahaman tentang aspek teknis tertentu

yang terkait dengan standardisasi dan penilaian kesesuaian, sangat diperlukan untuk memperkaya pengetahuan dan meningkatkan kompetensi personel PPS.

Sasaran pemahaman yang ingin dicapai antara lain :

- Pemahaman sistem manajemen mutu, lingkungan, energi, keamanan pangan, risiko dan lainnya;
- Pemahaman terhadap penerapan sistem penilaian kesesuaian;
- Pemahaman terhadap penerapan sertifikasi produk;
- Pemahaman mengenai persyaratan pemenuhan unjuk kerja dan kompetensi laboratorium;
- Pemahaman tentang perlindungan terhadap lingkungan dalam penyusunan standar.

4. Peningkatan Kinerja Komtek/SubKomtek

Dilaksanakan dalam rangka mengukur sasaran kinerja nomor 5 Meningkatnya kualitas Komtek/Subkomtek perumusan standar, yang terdiri dari:

1). Jumlah Komtek/ SubKomtek yang telah memenuhi kriteria evaluasi kinerja (indikator kinerja no, 9)

Evaluasi kinerja Komtek/SubKomtek dilakukan setiap tahun, selain bertujuan untuk mengevaluasi kinerja Komtek/SubKomtek berdasarkan ketentuan yang sudah ditetapkan dalam PSN terkait pengembangan SNI, juga dilakukan dalam rangka pembinaan dan penggalian masukan perbaikan terhadap mekanisme dan ketentuan yang telah ada. Evaluasi kinerja Komtek/ SubKomtek dilaksanakan dengan melihat aspek pengelolaan kesekretariatan Komtek/SubKomtek dalam pengembangan SNI, waktu perumusan SNI, penyelesaian PNPS sampai dengan tahap konsensus, dan pemeliharaan SNI.

Pelaksanaan rangkaian kegiatan dalam rangka evaluasi kinerja Komtek/SubKomtek terdiri dari:

- Sosialisasi ke Komtek/SubKomtek,
- Evaluasi Komtek/Subkomtek yang memenuhi kriteria evaluasi kinerja
- *desk assessment,*
- kunjungan lapangan ke Komtek/SubKomtek,
- kompilasi dan analisis hasil evaluasi kinerja
- laporan hasil evaluasi kinerja kepada Manajemen Teknis Pengembangan Standar – MTPS.

Badan Standardisasi Nasional (BSN) secara rutin setiap tahun memberikan penghargaan HTCA kepada Komite Teknis/Sub Komtek Perumusan SNI yang berkinerja terbaik sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan atas capaian kinerjanya dalam memenuhi ketentuan PSN terkait pengembangan SNI. Penghargaan HTCA 2016 dianugerhkan kepada Komtek/Subkomtek terbaik dalam penyelenggaraan acara Bulan Mutu Nasional tahun 2016. Proses penetapan nomine dan pemenang HTCA 2016 mengacu pada hasil evaluasi kinerja Komite Teknis.

2). Persentase Komtek/ SubKomtek Perumusan SNI yang dievaluasi kinerjanya (indikator kinerja no. 10)

Tidak semua Komtek/Subkomtek dapat dievaluasi karena beberapa alasan berikut :

- Komtek/Subkomtek baru terbentu, sehingga masih pada tahap awal perumusan
- Komtek/Subkomtek tidak aktif

5. Fasilitasi Perumusan SNI dan Kaji Ulang SNI

Dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran kinerja nomor 1 Meningkatnya kapasitas dan kualitas SNI, sasaran kinerja no 6 Terwujudnya fasilitasi program perumusan SNI, dan sasaran kinerja nomor 7 Terwujudnya pengembangan SNI yang koheren dengan perkembangan standar internasional. Kegiatan ini dilakukan antara lain untuk memenuhi komitmen Indonesia dalam perjanjian kerjasama baik regional maupun internasional terkait standardisasi (AFTA dan MEA 2015), khususnya untuk menyelaraskan standar nasional negara anggota dengan standar internasional yang disepakati, adopsi standar internasional menjadi SNI untuk produk prioritas atau kebutuhan mendesak, pelaksanaan kaji ulang SNI yang usianya di atas lima tahun yang belum ditangani oleh Komtek karena keterbatasan kapabilitas yang dimiliki oleh Sekretariat pengelola Komtek, serta penterjemahan SNI yang masih dalam bahasa asing atau standar non-SNI untuk bahan penyusunan rancangan SNI.

Manfaat dari penyelarasan/ harmonisasi standar antara lain akan meningkatkan kepercayaan pasar terhadap SNI; para pelaku usaha akan lebih mudah memasukkan produknya ke pasar internasional; meningkatkan keberterimaan produk yang bertanda SNI; memudahkan aliran produk yang bertanda SNI dari pabrik ke pasar; serta pengakuan terhadap hasil proses pengujian dan sertifikasi.

Dalam mendukung komitmen Indonesia dalam MEA, khususnya terkait dengan harmonisasi standar di ASEAN, BSN memberikan rekomendasi kertas kerja mengenai posisi Indonesia dalam forum terkait.

Selain itu, dilakukan fasilitasi kepada Komtek/Subkomtek yang berfungsi sebagai National Mirror Committee terhadap Technical Committee di ISO, IEC atau Codex dalam hal pemberian tanggapan.

Adapun indikator kinerja yang diukur adalah sebagai berikut :

1) Jumlah SNI yang difasilitasi pengembangannya dan dikaji ulang (indikator kinerja no. 1) Indikator ini menggambarkan gabungan antara indikator kinerja 2) dan 3)
2) Jumlah SNI yang dikaji ulang (indikator kinerja no. 11)
3) Jumlah fasilitasi perumusan SNI (indikator kinerja no. 12)
4) Jumlah fasilitasi penterjemahan dokumen SNI/Standar Internasional yang digunakan sebagai RSNI (indikator kinerja no. 13)
5) Jumlah dokumen rekomen-asi kertas posisi lndonesia terkait harmonisasi standar dalam forum kerjasama standardisasi regional / multilateral (indikator kinerja no. 14)
6) Persentase tanggapan Indo-nesia dalam forum pengembang standar internasional (indikator kinerja no. 15)

7) Persentase fasilitasi perumusan standar yang mengadopsi publikasi dari SDO (indikator kinerja no. 16)

2.3.3 Penetapan kinerja PPS dan bidang Mekanika, Elektroteknika dan Konstruksi tahun 2016

Memperhatikan semua hal tersebut di atas, maka penetapan kinerja PPS tahun 2016 ditetapkan sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 5 – Target kinerja PPS dan bidang MEK tahun 2016

No	Sasaran	Indikator kinerja	Formula Indikator Kinerja	Target 2016		Satuan
				PPS	Bid.MEK	
Customer Perspective						
1.	Meningkatnya kapasitas dan kualitas SNI	1. Jumlah SNI yang difasilitasi pengembangannya	Rasio jumlah RSNI yang difasilitasi perumusannya dibandingkan dengan target jumlah RSNI yang difasilitasi perumusannya	100	25	SNI
		2. Prosentase penyelesaian PNPS hingga RASNI tepat waktu	Rasio jumlah RASNI yang dapat diselesaikan dalam waktu 11 bulan dibandingkan dengan jumlah PNPS pada tahun berjalan	35	35	%
Internal Process Perspective						
2	Terwujudnya kebijakan pengembangan SNI yang sesuai kebutuhan nasional	3. Jumlah rekomendasi terkait Komite Teknis perumusan SNI	Rasio jumlah rekomendasi terkait Komtek perumusan SNI dibandingkan dengan target jumlah rekomendasi terkait Komtek perumusan SNI	30	10	dokumen
		4. Jumlah rekomendasi persetujuan usulan Program Nasional Perumusan Standar (PNPS)	Rasio jumlah rekomendasi persetujuan usulan PNPS dibandingkan dengan target jumlah rekomendasi persetujuan usulan PNPS	450	115	dokumen
		5. Jumlah rancangan Pedoman Standardisasi Nasional (PSN) terkait pengembangan SNI	Rasio jumlah rancangan PSN terkait pengembangan SNI dibandingkan dengan target jumlah rancangan PSN terkait pengembangan SNI	2	1	dokumen

Tabel 5 – (lanjutan)

No	Sasaran	Indikator kinerja	Formula Indikator Kinerja	Target 2016		Satuan
3	Terwujudnya RASNI yang siap ditetapkan yang telah memenuhi ketentuan PSN	6. Jumlah RASNI yang siap ditetapkan	Rasio jumlah RASNI yang siap ditetapkan dibandingkan dengan target jumlah RASNI yang siap ditetapkan	450	113	RASNI
		CATATAN: Waktu perumusan SNI dari PNPS sampai dengan RASNI	Rasio jumlah waktu perumusan SNI dari PNPS sampai dengan RASNI dibandingkan dengan target waktu perumusan SNI dari PNPS sampai dengan RASNI	11	11	Bulan
		7.Jumlah Sekretariat Komtek Perumusan SNI dikelola oleh BSN	Rasio jumlah Sekretariat Komtek perumusan SNI yang dikelola dibandingkan dengan target jumlah Sekretariat Komtek perumusan SNI yang dikelola	20	5	Komtek/ Sub Kom tek
4	Meningkatnya kualitas SDM perumusan standar	8.Jumlah sumberdaya perumusan standar yang meningkat kompetensinya	Rasio jumlah sumberdaya perumusan standar yang meningkat kompetensinya dibandingkan dengan target jumlah sumberdaya perumusan standar yang meningkat kompetensinya	550	140	orang
5	Meningkatnya kualitas Komtek/Sub Komtek perumusan standar	9. Jumlah Komtek/ SubKomtek yang telah memenuhi kriteria penilaian evaluasi kinerja	Rasio jumlah Komtek/ SubKomtek yang telah memenuhi kriteria penilaian evaluasi kinerja dibandingkan dengan target jumlah Komtek/ SubKomtek yang telah memenuhi kriteria penilaian evaluasi kinerja	50	13	Komtek/Sub Komtek
		10. Persentase Komtek/ SubKomtek perumusan SNI yang dievaluasi kinerjanya	Rasio persentase Komtek/ SubKomtek perumusan SNI yang dievaluasi kinerjanya dibandingkan dengan target persentase Komtek/ SubKomtek perumusan SNI yang dievaluasi kinerjanya	100	100	Prosen-tase

Tabel 5 – (lanjutan)

No	Sasaran	Indikator kinerja	Formula Indikator Kinerja	Target 2016		Satuan
4	Terwujudnya fasilitasi program perumusan SNI	11. Jumlah SNI yang dikaji ulang	Rasio jumlah SNI yang dikaji ulang dibandingkan dengan target jumlah SNI yang dijaki ulang	100	25	SNI
		12. Jumlah fasilitasi perumusan RSNI	Rasio jumlah fasilitasi perumusan RSNI dibandingkan dengan target fasilitasi perumusan RSNI	100	25	RSNI
		13. Jumlah fasilitasi pen-terjemahan dokumen SNI/SI yang digunakan sebagai RSNI	Rasio jumlah fasilitasi pen-terjemahan dokumen SNI/SI yang digunakan sebagai RSNI dibandingkan dengan target jumlah fasilitasi pen-terjemahan dokumen SNI/SI yang digunakan sebagai RSNI	40	10	RSNI

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Bidang Mekanika, Elektroteknika dan Konstruksi Pusat Perumusan Standar

Mengacu pada penetapan kinerja PPS untuk tahun 2016, maka hasil capaian pelaksanaan kegiatan bidang Mekanika, Elektroteknika dan Konstruksi PPS sampai dengan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Customer Perspective

Sasaran 1. Meningkatnya kapasitas dan kualitas SNI

1). Jumlah SNI yang difasilitasi pengembangannya

Pada tahun 2016, fasilitasi perumusan SNI melalui adopsi standar internasional dengan metode republikasi-reprint, diberikan kepada 4 (empat) Komite Teknis lingkup bidang Mekanika, Elektroteknika dan Konstruksi dengan total 31 judul untuk dirumuskan menjadi SNI . Jumlah dan rincian distribusinya :

Tabel 6 - Distribusi fasilitasi perumusan SNI adopsi SI

No	Komtek	Fasilitasi RSNI
1	13-02 Keselamatan Pemanfaat Tenaga Listrik	15
2	29-08 Lengkapan Listrik	10
3	31-01 Elektronika Untuk Keperluan Rumah Tangga	6
	TOTAL	**31**

Dengan demikian target 25 SNI yang difasilitasi perumusannya pada tahun 2016, mampu mencapai 31 SNI (124%).

2). Prosentase penyelesaian PNPS hingga RASNI tepat waktu

Mengacu pada implementasi SMM SNI ISO 9001, maka setiap PNPS yang diajukan oleh Komtek/Sub Komtek dan telah disetujui oleh MTPS, maka status perkembangannya harus senantiasa dimonitor. Berdasarkan monitoring pencapaian target waktu penetapan 13 bulan dari 127 RASNI lingkup bidang MEK yang diselesaikan pada tahun 2016, maka diketahui statusnya sebagai berikut:

Tabel 7 – Monitoring target Quick Win 13 bulan penetapan SNI

Bidang di PPS	SNI yang ditetapkan	SNI < 11 bulan	SNI > 11 bulan	Rata-rata (bulan)
Bidang Mekanika, Elektroteknika dan Konstruksi	127	43	84	16,48
Total PPS	**490**	**234**	**256**	**14,71**

Dengan demikian target 35 % penyelesaian PNPS hingga RASNI tepat waktu pada tahun 2016 yang ditetapkan oleh BSN, bidang MEK belum mampu mencapai target (34 %).

Internal Process Perspective

Sasaran 2. Terwujudnya kebijakan pengembangan SNI yang sesuai kebutuhan nasional

3). Jumlah rekomendasi terkait Komite Teknis perumusan SNI

Pada tahun 2016, MTPS yang beranggotakan 24 orang wakil dari berbagai K/L yang mengelola Komite Teknis/SubKomite Teknis Perumusan SNI, dan wakil dari pemangku kepentingan lain yang terlibat dalam perumusan SNI, telah melaksanakan tugasnya, dimana selama tahun 2016 MTPS telah mengadakan 10 kali pertemuan, dan menghasilkan 3 (tiga) paket rekomendasi kebijakan.

Memperhatikan Sasaran Tahunan, Indikator dan Target PPS yang ditetapkan pada tahun 2016, maka dapat diinformasikan dari target 10 jumlah rekomendasi terkait Komite Teknis perumusan SNI, capaian bidang Mekanika, Elektroteknika dan Konstruksi meliputi:

1). Rekomendasi persetujuan pembentukan/pengaktifan 3 (tiga) Komtek/SubKomtek
   (1). Pengaktifkan Komtek 13-01 *Keselamatan dan Kesehatan Kerja*
   (2). Pembentukan Komtek 35-03 *Informatika Kesehatan* (komtek baru)
   (3). Pembentukan Komtek 37-01 *Teknologi Grafika* (komtek baru)

   CATATAN:
   Untuk tahun 2015 terdiri dari Pembentukan 3 (tiga) Komtek baru, yang terdiri dari: Komtek 03-09 *Manajemen Pariwisata;* Komtek 03-10 *Manajemen Risiko;* dan Komtek 17-04 *Standar Dasar*.

2). Rekomendasi persetujuan pembubaran Komite Teknis/Sub Komite Teknis disertai pelimpahan ruang lingkup pada tahun 2016:
   - Pembubaran Komtek 03-06 *Tanggung Jawab Sosial* (TJS) dan melimpahkan ruang lingkup Komtek 03-06 TJS ke ruang lingkup Komtek 03-02 *Sistem Manajemen Mutu* (SMM).

3). Rekomendasi persetujuan perubahan keanggotaan tahun 2016 untuk 12 (dua belas) Komite Teknis.

4). Rekomendasi persetujuan penambahan ruang lingkup tahun 2016 untuk satu Komite Teknis, yaitu: Komtek 03-05 LPK.

Dengan demikian target 10 rekomendasi terkait Komite Teknis perumusan SNI pada tahun 2016 yang ditetapkan oleh BSN, bidang Mekanika, Elektroteknika dan Konstruksi telah mampu mencapainya, bahkan melebihi target (17).

4). Jumlah rekomendasi persetujuan usulan Program Nasional Perumusan Standar (PNPS)

Memperhatikan Sasaran Tahunan, Indikator dan Target PPS yang ditetapkan pada tahun 2016, maka dapat diinformasikan dari target 115 rekomendasi persetujuan usulan Program Nasional Perumusan Standar (PNPS), capaian bidang Mekanika, Elektroteknika dan Konstruksi meliputi:

1). Persetujuan PNPS tahun 2016 sebanyak 166 judul, dengan rincian sebagai berikut :
- 89 PNPS baru
- 50 PNPS revisi
- 1 PNPS amandeman
- 2 PNPS ralat
- 8 PNPS terjemahan
- Perpanjangan 15 PNPS

2). Persetujuan pembatalan untuk PNPS: 0;

Sebagai perbandingan pengajuan PNPS lingkup bidang MEK untuk tahun 2015 dan tahun 2016 dapat digambarkan sebagaimana Diagram 5 di bawah ini.

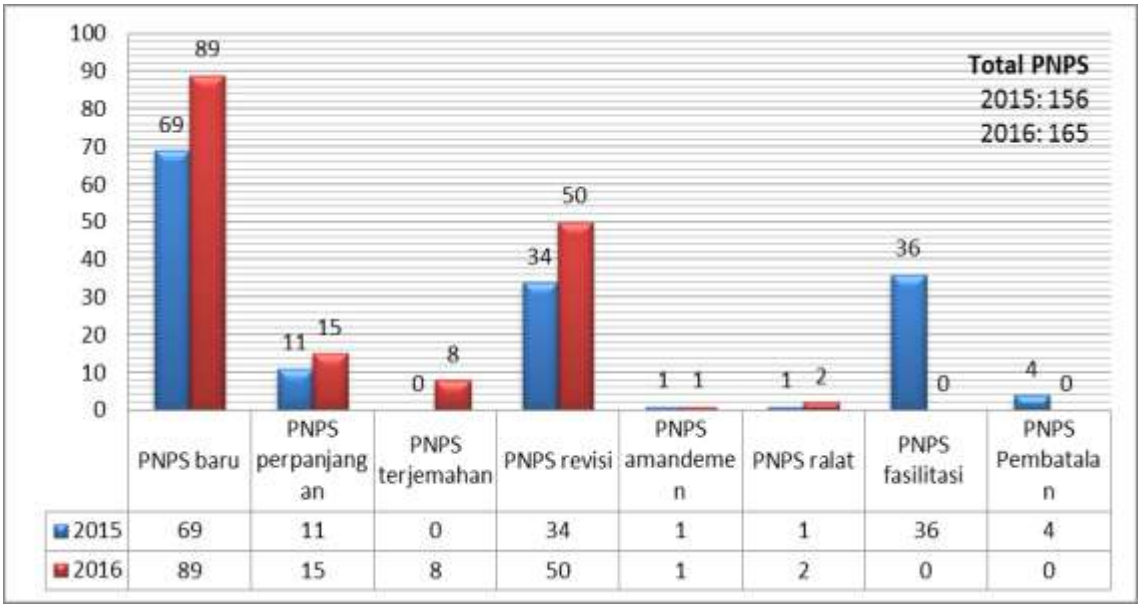

	PNPS baru	PNPS perpanjangan	PNPS terjemahan	PNPS revisi	PNPS amandemen	PNPS ralat	PNPS fasilitasi	PNPS Pembatalan
2015	69	11	0	34	1	1	36	4
2016	89	15	8	50	1	2	0	0

Diagram 6 – Perbandingan kategori PNPS lingkup bidang MEK antara tahun 2015 dan 2016

Sementara itu bila dilihat dari jumlah total pengajuan PNPS lingkup bidang Mekanika, Elektroteknika dan Konstruksi dalam lima tahun terakhir, terlihat flutuasinya sebagaimana Diagram 6 di bawah ini.

Dengan demikian target 115 rekomendasi terkait rekomendasi persetujuan usulan Program Nasional Perumusan Standar (PNPS) pada tahun 2016 yang ditetapkan oleh BSN,

bidang Mekanika, Elektroteknika dan Konstruksi telah mampu mencapainya, bahkan melebihi target (165).

5). Jumlah rancangan Pedoman Standardisasi Nasional (PSN) terkait pengembangan SNI

Memperhatikan Sasaran Tahunan, Indikator dan Target PPS yang ditetapkan pada tahun 2016, maka dapat diinformasikan dari target satu Jumlah rancangan Pedoman Standardisasi Nasional (PSN) terkait pengembangan SNI, capaian bidang Mekanika, Elektroteknika dan Konstruksi adalah menjadi konseptor revisi PSN 03.1:2007 tentang Adopsi Standar Internasional menjadi SNI.

Untuk kinerja rancangan Pedoman Standardisasi Nasional (PSN) terkait pengembangan SNI pada tahun 2016 PPS telah berhasil merevisi 4 (empat) PSN, salah satunya adalah PSN tentang adopsi.

Dengan demikian target 1 (satu) rancangan Pedoman Standardisasi Nasional (PSN) terkait pengembangan SNI pada tahun 2016 yang ditetapkan oleh BSN, bidang Mekanika, Elektroteknika dan Konstruksi telah mampu mencapainya (1 PSN).

Sasaran 3. Terwujudnya RASNI yang siap ditetapkan yang telah memenuhi ketentuan PSN

6). Jumlah RASNI yang siap ditetapkan

Kegiatan pengendalian proses perumusan SNI ini merupakan kegiatan yang mendukung tercapainya output SNI yang berkualitas dan taat azas. Hal yang dilakukan antara lain koordinasi dan penyelesaian masalah dengan Sekretariat Komite Teknis/Sub Komite Teknis, pengelolaan Sekretariat dan Komite Teknis serta pengendalian proses perumusan SNI baik di rapat teknis maupun rapat konsensus.

Mengacu pada penetapan kinerja PPS tahun 2016, target penetapan SNI yang ingin dicapai adalah 450 SNI, sementara realisasi penetapan dan publikasi SNI pada tahun 2016 telah melebihi target yang ditetapkan, yaitu realisasinya mencapai 490 SNI, dimana 116 SNI diantaranya merupakan kontribusi dari bidang Mekanika, Elektroteknika dan Konstruksi. Jumlah SNI yang ditetapkan bila dilihat perbandingan antara target SNI menurut penetapan kinerja PPS, realisasi penetapan SNI dengan usulan SNI berdasarkan kebutuhan pasar (PNPS) untuk tahun 2016 dengan tahun sebelumnya serta capai bidang Mekanika, Elektroteknika dan Konstruksi dapat dilihat pada Tabel 7 di bawah ini.

Tabel 8 – Target dan realisasi penetapan SNI dibandingkan dengan usulan PNPS

URAIAN	PPS		Bid. MEK
	2015	2016	2016
Target SNI menurut Penetapan Kinerja	350	450	113
Realisasi penetapan SNI	501	474	127
Usulan SNI berdasarkan kebutuhan pasar (PNPS)	580	581	166

Dari target 450 SNI tahun 2016 berhasil dicapai 490 SNI yang ditetapkan, dimana terdapat 127 RASNI yang dikontribusikan oleh bidang Mekanika, Elektroteknika dan Konstruksi dari target yang ditetapkan sebesar 113 SNI (102,65 %).
Sementara itu kontribusi RASNI dari bidang Mekanika, Elektroteknika dan Konstruksi dalam kurun waktu lima tahun terakhir dapat dilihat dalam Diagram 7 di bawah ini.

Dengan demikian target 113 jumlah RASNI yang siap ditetapkan pada tahun 2016 yang ditetapkan oleh BSN, bidang Mekanika, Elektroteknika dan Konstruksi telah mampu mencapainya, bahkan melebihi target (127 RASNI).

CATATAN: Waktu perumusan SNI dari PNPS hingga RASNI

a).

7). Jumlah Sekretariat Komtek Perumusan SNI dikelola oleh BSN

Sampai tahun 2016, terdapat 28 (dua puluh delapan) Sekretariat Komtek/Sub Komtek yang dikelola oleh PPS-BSN dimana 2 (dua) diantaranya sekretariat Komteknya dikelola oleh bidang Mekanika, Elektroteknika dan Konstruksi.

Tabel 9 – Pengelolaan Komtek/SubKomtek Perumusan SNI di bidang MEK tahun 2016

No	Sekretariat di BSN	Kode	Nama Komite Teknis/Sub Komtek
1	V	13-04	Peralatan Pemadam Kebakaran
2	V	43-02	Mobil Listrik

Dengan demikian target 5 sekretariat Komtek perumusan SNI yang dikelola oleh bidang Mekanika, Elektroteknika dan Konstruksi pada tahun 2016 yang ditetapkan oleh BSN, bidang Mekanika, Elektroteknika dan Konstruksi hanya mencapai 2 Komtek/Subkomtek (40 % dari target).

Sasaran 4. Meningkatnya kualitas SDM perumusan standar

8). Jumlah sumberdaya perumusan standar yang meningkat kompetensinya

Mengacu pada penetapan kinerja bidang Mekanika, Elektroteknika dan Konstruksi untuk tahun 2016, target jumlah sumberdaya perumusan standar yang meningkat kompetensinya yang ingin dicapai adalah 140 orang, dengan bentuk kegiatan dalam bentuk:

A. Workshop Perumusan SNI

Workshop yang dilakukan tidak terbatas di daerah Jakarta, tetapi juga meliputi beberapa daerah di Indonesia. Tujuan pelaksanaan workshop tidak hanya pembinaan sumber daya manusia, tetapi sekaligus menyaring inspirasi dari masyarakat daerah terkait produk unggulan di daerah masing-masing untuk dirumuskan menjadi SNI.

Workshop penguatan sumber daya perumusan SNI yang dilaksanakan sama seperti workshop yang biasa dilakukan di tahun sebelumnya yaitu Workshop Konseptor, Workshop Editor dan Workshop, Workshop Pengelolaan Komite Teknis dan Workshop Perumusan SNI Unggulan Daerah.

Workshop Pengelolaan Komite Teknis bertujuan untuk memberikan informasi terbaru kepada Sekretariat dan anggota Komite Teknis dan Sub Komite Teknis, serta sebagai media berbagi informasi antara PPS, Sekretariat dan anggota Komite Teknis dan Sub Komite Teknis, sedangkan Workshop Perumusan SNI Unggulan Daerah bertujuan selain untuk mengedukasi para calon editor dan konseptor, juga untuk mendapatkan informasi dari para pemangku kepentingan di daerah terkait dengan produk unggulan daerah yang dapat diusulkan menjadi SNI.

a). Workshop Konseptor dan/atau Editor Perumusan SNI

Workshop ini dilaksanakan untuk memberikan pemahaman tentang ketentuan PSN terkait perumusan SNI bagi calon konseptor atau editor yang berada di Sekretariat Komite Teknis, Sub Komite Teknis, K/L, balai pengujian, laboratorium dan perusahaan swasta.

b). Workshop Pengelolaan Sekretariat Komtek/SubKomtek Perumusan SNI

Workshop ini dilaksanakan untuk memberikan pemahaman tentang ketentuan PSN terkait pengelolaan Komtek/Sub Komtek Perumusan SNI bagi Sekretariat Komite Teknis, Sub Komite Teknis yang dikelola oleh K/L.

c). Workshop Tenaga Ahli Standardisasi (TAS)

Workshop ini dilaksanakan untuk memperbaharui informasi terkait perumusan SNI, sehingga para TAS mempunyai modal pengetahuan yang memadai dalam mengendalikan perumusan SNI, terutama dalam rapat konsensus agar sesuai dengan ketentuan Pedoman Standardisasi Nasional terkait.

d). Workshop Perumusan SNI Unggulan Daerah

Workshop ini dilakukan di daerah yang telah mempunyai perjanjian kesepahaman (MoU) dengan BSN untuk mengembangkan program standardisasi dan penilaian kesesuaian. PPS menindaklanjuti kerjasama ini dalam bentuk workshop perumusan SNI unggulan daerah.

B. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia perumusan standar

Kegiatan ini lebih bertujuan untuk meningkatkan kompetensi sumberdaya internal BSN yang ada di lungkungan PPS terkait perkembangan terkini tentang standardisasi dan penilaian kesesuaian.

Secara keseluruhan, kegiatan pembinaan SDM perumusan yang telah dilaksanakan oleh bidang Mekanika, Elektroteknika dan Konstruksi sepanjang tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel 11 di bawah ini.

Tabel 10 – Pembinaan SDM Perumusan SNI tahun 2016 dan kontribusi bidang MEK

No	Jenis Training/Workshop	Penyelenggara	Lokasi	Jumlah Audience (orang)	Kontribusi bid MEK
1).	**WS Perumusan SNI**				
a.	**WS Editor/Konseptor Perumusan SNI**				
1	Workshop Konseptor	BSN	Hotel Ibis Tamarin jakarta	50	12
2	Workshop editor	BSN	Hotel Ibis Tamarin jakarta	50	13
3	Pemahaman PSN dan Produk Hukum	Litbang SDA KemenPU-PR	Puslit SDA Jl Juanda. Bandung	43	43
4	Bimtek Konseptor RSNI Bidang informasi Geografi / Geomatika	BIG	Margo Hotel Depok	38	
5	Bimtek Editor RSNI Bidang informasi Geografi / Geomatika	BIG	Margo Hotel Depok	28	
6	Penyusunan Rancangan SNI dan Pedoman	Kemen PU-PR, PUSKIM	Jl.Turangga Bandung	40	40
7	WS Konseptor dan Editor	BPPT	PUSPITEK Serpong	60	60
8	WS Konseptor dan Editor	Kementan	Bogor	25	
9	WS Konseptor dan Editor	Kemenkes	Pusdatin, Kemenkes	13	
b.	**Workshop Tenaga Ahli Standardisasi (TAS)**				
c.	**Workshop Perumusan SNI Unggulan Daerah**				
1	Workshop Pengembangan kompetensi daerah (Solo)	BSN	LPPM UNS Solo	52	
2	Workshop Pengembangan kompetensi daerah (Palembang)	BSN	Hotel Daria Palembang	55	
d.	**Workshop Pengelolaan Sekretariat Komtek/SubKomtek Perumusan SNI**				
1	Bimtek Pengelolaan komtek	Kementan	Kementan Ragunan	15	
2	Workshop Bimtek Pengelolaan komtek	LAPAN	Hotel Neo, sentul. Bogor	25	

Tabel 10 – (lanjutan)

No	Jenis Training/Workshop	Penyelenggara	Lokasi	Jumlah Audience (orang)	Kontribusi bid MEK
2)	**Peningkatan kompetensi sumber daya manusia perumusan standar**				
1	Pelatihan SISPK	BSN	A one Jakarta	100	25
2	Workshop Internal Skema SNI Wajib	BSN	Hotel Cemara jakarta	40	10
3	Workshop Internal lingkup K3L	BSN	Hotel Arkadia jakarta	40	9
4	Training transisi ISO 9001 2008 ke ISO 9001:2015	BSN	Hotel Akmani Jakarta	40	10
	Total SDM			**714**	**224**

Tabel 11 – Tabulasi kegiatan pembinaan SDM perumusan SNI tahun 2015 dan 2016

No	Kegiatan yang dilaksanakan	Tahun	
		2015	2016
1.	Penyelenggaraan WS konseptor SNI dan editor penulisan SNI	2	9
2.	Penyelenggaraan WS TAS-QC *)		
	a. Rekrutmen TAS-QC baru	-	-
	b. Refresmen TAS-QC yang ada	1	-
3.	Penyelenggaraan WS pengembangan SNI di daerah	-	2
4.	Workshop Pengelolaan Sekretariat Komtek/SubKomtek Perumusan SNI	-	2
5.	Peningkatan kompetensi sumber daya manusia perumusan standar	7	4

Keterangan:

*) Pada tahun 2016, PPS tidak menyelenggarakan WS TAS-QC karena adanya kebijakan internal untuk memprioritaskan pembinaan SDM yang lain.

Dengan demikian target 140 orang sumberdaya perumusan standar yang meningkat kompetensinya pada tahun 2016 yang ditetapkan oleh BSN, bidang Mekanika, Elektroteknika dan Konstruksi telah mampu mencapainya, bahkan melebihi target (224 orang).

Sasaran 5. Meningkatnya kualitas Komtek/Sub Komtek perumusan standar

9). Jumlah Komtek/ SubKomtek yang telah memenuhi kriteria penilaian evaluasi kinerja

Komite Teknis dan Sub Komite Teknis merupakan kepanjangan tangan BSN dalam perumusan SNI. Oleh karena itu telah menjadi tanggung jawab BSN melalui Pusat Perumusan Standar untuk membina Komite Teknis dan Sub Komite Teknis tersebut.

Pemeliharaan Komite Teknis dan Sub Komite Teknis dilakukan melalui evaluasi kinerja berdasarkan Pedoman Standardisasi Nasional tentang Pengelolaan Komite Teknis dan Subkomite Teknis. Evaluasi ini dilakukan secara rutin setiap tahun. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai dasar PPS dalam memperbaiki pengelolaan Komite Teknis dan Sub Komite Teknis, baik yang berada di PPS maupun di Kementerian/ Lembaga lain.

Hasil evaluasi kinerja ini juga digunakan sebagai dasar dalam penganugerahan *Herudi Technical Committee Award* (HTCA) kepada Komite Teknis dan Sub Komite Teknis. Terdapat 4 kriteria yang digunakan dalam penilaian kinerja untuk menentukan Komite Teknis/ Sub Komite Teknis penerima penganugerahan HTCA, yaitu:

Tabel 12 – Kriteria evaluasi kinerja Komtek tahun 2016

No	Kriteria Evkin	Bobot (%)
1	Kinerja Sekretariat	35
2	Penyelesaian PNPS sampai dengan Penyerahan RSNI3 ke BSN	25
3	Waktu Perumusan SNI dari PNPS hingga Penyerahan RSNI3 ke BSN (kecuali metode rep-rep)	25
4	Pemeliharaan SNI	15
	Total	100

Dari 33 Komtek/Sub Komtek lingkup bidang Mekanika, Elektroteknika dan Konstruksi yang dievaluasi kinerjanya, terdapat 13 Komtek/Sub Komtek yang mendapatkan scoring karena dapat dievaluasi kinerjanya (43,33 %) yang terdiri dari:

Tabel 13 - Komtek di lingkup bidang MEK yang memenuhi scoring evkin tahun 2016

No	Kode Komtek	Nama Komtek
1	31-01	Elektronika Untuk Keperluan Rumah Tangga
2	21-01-S1	Permesinan dan Alsintan
3	21-01	Permesinan dan produk permesinan
4	65-04	Sarana dan Prasarana Pertanian
5	29-07	Kabel dan konduktor listrik
6	91-01-S4	Bahan, Sains, Struktur dan Konstruksi Bangunan
7	27-02	Turbin Listrik
8	29-02	Perlengkapan dan sistem proteksi listrik
9	29-06	Instalasi dan keandalan ketenagalistrikan
10	29-09	Mesin Listrik
11	91-03	Persyaratan Umum Instalasi Listrik
12	91-01-S2	Rekayasa Jalan dan Jembatan
13	29-03	Insulasi Listrik

Dengan demikian target 13 Komtek/SubKomtek yang telah memenuhi kriteria penilaian evaluasi kinerja pada tahun 2016 yang ditetapkan oleh BSN, bidang Mekanika, Elektroteknika dan Konstruksi telah mampu mencapainya (13 Komtek/SubKomtek).

10). Persentase Komtek/ SubKomtek perumusan SNI yang dievaluasi kinerjanya

Evaluasi kinerja tahun 2016 dilakukan terhadap 137 Komite Teknis/Subkomite Teknis dimana 38 diantaranya dikelola bidang Mekanika, Elektroteknika dan Konstruksi. Pelaksanaan evaluasi kinerja hanya pada komtek yang mengajukan PNPS pada tahun 2016.

Pelaksanaan evaluasi kinerja Komtek/Sub Komtek perumusan SNI lingkup bidang Mekanika, Elektroteknika dan Konstruksi dilaksanakan terhadap 30 dari 33 Komtek/Sub Komtek (90,91 %), karena dua Komtek baru dan satu Komtek telah dibubarkan pada tahun 2016 .

Kunjungan lapangan yang dilaksanakan dari bulan Juli sampai Agustus 2016, hanya dilakukan pada 5 Komtek wakil tiap bidang yang ada di lingkungan PPS dengan penilaian tertinggi dari hasil *desk assessment* mengacu pada kriteria evkin. Adapun wakil dari bidang Mekanika, Elektroteknika dan Konstruksi yang lolos *desk assessment* adalah sbb:

Tabel 14 – Komtek di lingkup bidang MEK yang lolos *desk assessment* evkin tahun 2016

No	Kode Komtek	Nama Komtek
1	31-01	Elektronika Untuk Keperluan Rumah Tangga

Berdasarkan hasil scoring terhadap masing-masing kriteria evkin tersebut, diperoleh 5 (lima) nominee HTCA 2016, yang terdiri dari:

1. Komite Teknis 03-02 Sistem Manajemen Mutu ;
2. Komite Teknis 17-04 Standar Dasar ;
3. Komite Teknis 59-01 Tekstil dan Produk Tekstil ;
4. Komite Teknis 65-05 Produk Perikanan; serta
5. Komite Teknis 65-08 Produk Perikanan Nonpangan.

Dari nominee tersebut diatas, yang memiliki hasil scoring tertinggi dan berhak menerima HTCA 2016 adalah Komite Teknis 65-05 Produk Perikanan.

Dengan demikian target 100 % Komtek/SubKomtek perumusan SNI yang dievaluasi kinerjanya pada tahun 2016 yang ditetapkan oleh BSN, bidang Mekanika, Elektroteknika dan Konstruksi telah belum mampu memenuhi dengan sempurna (90,91 %).

Sasaran 6. Terwujudnya fasilitasi program perumusan SNI

11). Jumlah SNI yang dikaji ulang

Dalam program ini, PPS melakukan beberapa kegiatan berikut:

1) memberikan dukungan fasilitasi perumusan SNI melalui adopsi standar internasional yang menjadi sektor prioritas dengan metode republikasi-reprint;
2) memberikan dukungan ke Komtek untuk pemeliharaan SNI yang telah berusia lebih dari 5 tahun dengan melalui kegiatan kaji ulang SNI.

SNI perlu untuk dikaji ulang untuk menjaga kesesuaian SNI terhadap kepentingan nasional dan kebutuhan pasar; mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, inovasi, dan teknologi; dan menilai kelayakan dan kekiniannya. Untuk menjaga keterkinian SNI, sesuai dengan praktek di internasional, kaji ulang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali.

Dalam pelaksanaannya, perlu dilihat beberapa faktor untuk menghasilkan rekomendasi yang tepat bagi SNI tersebut, apakah SNI tersebut perlu diabolisi (jika tidak diperlukan lagi), tetap (jika masih sesuai), revisi (jika diperlukan perubahan yang cukup besar dalam substansinya), amandemen (jika hanya diperlukan sedikit perubahan substansi), serta ralat (jika terdapat kesalahan kecil misalnya kesalahan cetak). Beberapa faktor tersebut adalah: ketentuan pengembangan SNI yang ada, standar internasional yang tersedia, kesepakatan kerjasama regional (ASEAN) terkait harmonisasi standar, dan *national differences* apabila diperlukan.

Dalam perjalanannya, target 25 SNI dikaji ulang pada tahun 2016 yang ditetapkan oleh BSN, bidang Mekanika, Elektroteknika dan Konstruksi telah tidak mampu memenuhinya karena adanya pemotongan anggaran.

12). Jumlah fasilitasi perumusan RSNI

Pada tahun 2016, fasilitasi perumusan SNI melalui adopsi standar internasional dengan metode republikasi-reprint, diberikan kepada 3 (tiga) Komite Teknis lingkup bidang Mekanika, Elektroteknika dan Konstruksi dengan total 31 judul untuk dirumuskan menjadi SNI yang terdiri dari:

1 13-02 Keselamatan Pemanfaat Tenaga Listrik (15 judul)
2 29-08 Lengkapan Listrik (10 judul)
3 31-01 Elektronika Untuk Keperluan Rumah Tangga (6 judul)

Dengan demikian target 25 SNI yang difasilitasi perumusannya pada tahun 2016, bidang Mekanika, Elektroteknika dan Konstruksi mampu mencapai 31 SNI (124 %).

13). Jumlah fasilitasi penterjemahan dokumen SNI/SI yang digunakan sebagai RSNI

Dalam rencana strategis PPS sebenarnya belum ada, namun dalam penetapan kinerja PPS tahun 2016 untuk sasaran terwujudnya fasilitasi program perumusan SNI, ditambahkan lagi satu indikator kinerja : jumlah fasilitasi penterjemahan dokumen SNI/SI yang digunakan sebagai RSNI. Hal ini dikarenakan adanya tuntutan kebutuhan dari pemangku kepentingan dan sebagai upaya untuk mempermudah pengguna dalam memahami substansi SNI yang telah ada namun saat ini masih tersedia dalam bahasa Inggris, karena merupakan SNI hasil adopsi standar internasional dengan metode republikasi-reprint.

Untuk kegiatan ini tahun 2016 batal dilaksanakan karena adanya pemotongan anggaran.

Dengan demikian target 10 SNI difasilitasi penterjemahanna pada tahun 2016 yang ditetapkan oleh BSN, bidang Mekanika, Elektroteknika dan Konstruksi telah tidak mampu memenuhinya karena adanya pemotongan anggaran.

Secara keseluruhan target yang ditetapkan pada tahun 2016 untuk bidang Mekanika, Elektroteknika dan Konstruksi telah dapat dicapai dengan baik, meskipun dalam beberapa kasus masih ada beberapa target yang belum dapat terpenuhi karena kendala terkait dengan hal-hal berikut:

- Terbatasnya anggaran yang tersedia untuk merealisasikan target yang ditetapkan;
- kurangnya komitmen yang kuat dari pemangku kepentingan yang terkait dalam pengelolaan Sekretariat Komtek perumusan SNI;
- terbatasnya waktu para pengambil kebijakan yang ada di K/L untuk terlibat secara penuh dalam pelaksanaan koordinasi antar K/L dalam rangka pemecahan permasalahan yang dihadapi bersama;
- kurangnya alokasi anggaran pendukung dari BSN untuk kegiatan prioritas yang terkait dengan pengembangan SNI dan penguatan proses perumusan SNI, seperti untuk koordinasi interdep, workshop pengembangan SNI di daerah, dan operasional perjalanan dinas.

3.2. Realisasi Anggaran

Sebagai bagian dari unit kerja di Kedeputian PKS, maka pada tahun 2016 PPS mendapatkan pagu anggaran setelah pemotongan sebesar Rp. 5.183.795.000,- (lima milyar seratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) untuk membiayai 5 (lima) kegiatan utama yang ada di PPS.

Dari pagu anggaran yang diberikan, PPS mampu merealisasikan penyerapan anggaran sebesar 98,77 %. Adapun rincian masing-masing kegiatan menurut output yang ada di PPS adalah sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 19 di bawah ini.

Tabel 15 – Pagu anggaran PPS dan realisasi penyerapan anggaran DIPA tahun 2016

Output	Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa Pagu	Persen
001	526.623.000	508.699.500	17.923.500	96.60%
002	2.613.343.000	2.584.168.969	29.174.031	98.88%
003	576.691.000	575.142.269	1.548.731	99.73%
005	1.429.213.000	1.414.101.391	15.111.609	98.94%
006	37.925.000	37.869.000	56.000	99.85%
	5.183.795.000	**5.119.981.129**	**63.813.871**	**98.77%**

Keterangan:

001 Perumusan kebijakan pengembangan standar
002 Pengendalian proses perumusan SNI
003 Pembinaan Sumber Daya Manusia Perumusan SNI

005 Fasilitasi perumusan dan kaji ulang SNI
006 Peningkatan Kinerja Komtek/SubKomtek

Secara keseluruhan target realisasi anggaran tahun 2016 untuk PPS telah dapat dicapai dengan baik (98,77 %), meskipun masih ada beberapa kegiatan yang realisasinya mengalami kendala terkait dengan hal-hal berikut:

- mayoritas alokasi anggaran pada kegiatan 01 dialokasikan untuk pemberian honor narasumber bagi anggota MTPS, namun ternyata dari beberapa kali rapat MTPS yang dilaksanakan pada tahun 2016, tingkat kehadiran rata-rata anggota MTPS adalah dibawah 80 %, sehingga honor narasumber yang telah dialokasikan tidak dapat direalisasikan.

BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan umum

Secara umum, kinerja bidang Mekanika, Elektroteknika dan Konstruksi PPS pada tahun 2016 telah menunjukkan hasil yang memuaskan karena secara umum telah mampu memenuhi target yang ditetapkan pada tahun 2016 untuk Sasaran dan Target PPS yang ditetapkan. Perbandingan antara target dan realisasi yang telah dicapai pada tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel 20 di bawah ini.

Tabel 16 – Target dan realisasi kinerja bidang MEK PPS tahun 2016

No	Sasaran	Indikator kinerja	Target 2016		Realisasi	Satuan
			PPS	Bid.MEK	Bid.MEK 2016	
Customer Perspective						
1.	Meningkatnya kapasitas dan kualitas SNI	3. Jumlah SNI yang difasilitasi pengembangannya	100	25	31	SNI
		4. Prosentase penyelesaian PNPS hingga RASNI tepat waktu	35	35	34	%
Internal Process Perspective						
2	Terwujudnya kebijakan pengembangan SNI yang sesuai kebutuhan nasional					
		3. Jumlah rekomendasi terkait Komite Teknis perumusan SNI	30	10	17	dokumen
		4. Jumlah rekomendasi persetujuan usulan Program Nasional Perumusan Standar (PNPS)	450	115	166	dokumen
		5. Jumlah rancangan Pedoman Standardisasi Nasional (PSN) terkait pengembangan SNI	2	1	1	dokumen
3	Terwujudnya RASNI yang siap ditetapkan yang telah memenuhi ketentuan PSN	6. Jumlah RASNI yang siap ditetapkan	450	113	116	RASNI
		CATATAN: Waktu perumusan SNI dari PNPS sampai dengan RASNI	11	11	16,7	Bulan
		7. Jumlah Sekretariat Komtek Perumusan SNI dikelola oleh BSN	20	5	2	Komtek/ Sub Komtek
4	Meningkatnya kualitas SDM perumusan standar	8. Jumlah sumberdaya perumusan standar yang meningkat kompetensinya	550	140	225	orang
5	Meningkatnya kualitas Komtek/Sub Komtek perumusan standar	9. Jumlah Komtek/ SubKomtek yang telah memenuhi kriteria penilaian evaluasi kinerja	50	13	13	Komtek/Sub Komtek
		10. Persentase Komtek/ SubKomtek perumusan SNI yang dievaluasi kinerjanya	100	100	90,91	Prosen-tase

Tabel 16 – (lanjutan)

No	Sasaran	Indikator kinerja	Target 2016		Realisasi	Satuan
			PPS	Bid.MEK	Bid.MEK 2016	
6	Terwujudnya fasilitasi program perumusan SNI	11. Jumlah SNI yang dikaji ulang	100	25	0 *)	SNI
		12. Jumlah fasilitasi perumusan RSNI	100	25	31	RSNI
		13. Jumlah fasilitasi penterje-mahan dokumen SNI/SI yang digunakan sebagai RSNI	40	10	0 *)	RSNI

KETERANGAN:

*) Kegiatan tidak dilaksanakan karena adanya pemotongan anggaran.

Meskipun demikian, sebenarnya masih ada beberapa sub kegiatan yang masih perlu diperhatikan dan dilakukan evaluasi kembali secara matang untuk maksud perbaikan dan peningkatan kinerja di masa datang karena capaiannya yang masih dibawah target, yaitu:

(1) pencapaian sasaran waktu rata-rata waktu perumusan dari PNPS sampai dengan RASNI pada tahun 2016 masih memerlukan waktu lebih dari 11 bulan, melebihi target yang ditetapkan (11 bulan), sehingga pendampingan ke Sekretariat Komtek/Sub Komtek sangat perlu dilakukan dalam rangka penguatan pengelolaan jadwal kegiatan perumusan SNI;

(2) pencapaian target 100 % Komtek/Sub Komtek yang dievaluasi kinerjanya pada tahun 2016 hampir terpenuhi (90,91%) sehingga perlu penguatan koordinasi dengan Sekretariat pengelola Komtek/Sub Komtek;

(3) penetapan target SNI yang dikaji ulang dan difasilitasi penterjemahannya tidak dapat dilaksanakan karena adanya pemotongan anggaran, sehingga ke depan perlu diprioritaskan pengalokasian anggaran untuk pelaksanaan kegiatan tersebut.

4.2 Rekomendasi

Memperhatikan realisasi capaian terhadap target yang ditetapkan kepada bidang Mekanika, Elektroteknika dan Konstruksi tahun 2016, dan kendala serta peluang perbaikan yang masih terbuka lebar, maka untuk maksud perbaikan dan peningkatan kinerja di masa datang perlu dipertimbangkan hal-hal berikut:

(1). Penguatan pembinaan dan pendampingan kepada Sekretariat Komtek/Sub Komtek dalam memahami ketentuan yang terdapat dalam PSN pengembangan SNI yang harus dipenuhi, misalnya melalui audiensi, workshop in-house ke sekretariat Komtek/Sub Komtek, penguatan reminder, koordinasi intensif dan penyelenggaraan workshop pengelolaan Komtek sebagai media *benchmarking* antar sekretariat Komtek.

(2). Penguatan pengaturan kelembagaan antar K/L terkait pengelolaan kegiatan standardisasi sebagaimana diamanatkan dalam UU No.20/2014, agar terdapat unit

kerja di K/L yang mempunyai tupoksi spesifik terkait standardisasi, termasuk salah satunya tanggung jawab untuk pengelolaan Sekretariat Komtek/Sub Komtek yang ada di lingkup K/L tersebut.

(3). Penguatan perencanaan kegiatan dan penetapan target yang realistis, untuk menghindari target yang tidak mungkin dicapai, misalnya keadaan dimana pada saat evaluasi kinerja dilakukan masih ada Komtek/Sub Komtek yang baru saja terbentuk (kurang dari satu tahun) dan belum ada aktifitas perumusan SNI, sehingga tidak dapat dilakukan evaluasi kinerja.

(4). Penguatan perencanaan pengalokasian anggaran untuk program dan kegiatan serta pengendalian pelaksanaan kegiatan agar target realisasi anggaran dapat ditingkatkan dari capaian sebelumnya.

~~~ ~~~
~~~

LAMPIRAN

BADAN STANDARDISASI NASIONAL

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : I Nyoman Supriyatna
Jabatan : Kepala Pusat Perumusan Standar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Puji Winarni
Jabatan : Plt. Deputi bidang Penelitian dan Kerjasama Standardisasi

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2016

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Puji Winarni	I Nyoman Supriyatna

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
PUSAT PERUMUSAN STANDAR
BADAN STANDARDISASI NASIONAL

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
Customer Perspectives			
1 Meningkatnya kapasitas dan kualitas SNI	1 Jumlah SNI yang difasilitasi pengembangannya	100	SNI
	2 Persentase penyelesaian PNPS hingga RASNI tepat waktu	35	%
Internal Process Perspectives			
2 Terwujudnya kebijakan pengembangan SNI yang sesuai kebutuhan nasional	3 Jumlah rekomendasi terkait Komite Teknis perumusan SNI	30	rekomendasi
	4 Jumlah rekomendasi persetujuan usulan Program Nasional Perumusan Standar (PNPS)	450	rekomendasi
	5 Jumlah rancangan Pedoman Standardisasi Nasional (PSN) terkait pengembangan SNI	2	rancangan
3 Terwujudnya RASNI yang siap ditetapkan yang telah memenuhi ketentuan PSN	6 Jumlah RASNI yang siap ditetapkan	500	RASNI
	7 Jumlah Sekretariat Komtek Perumusan SNI dikelola oleh BSN	20	sekretariat Komtek
4 Meningkatnya kualitas SDM perumusan standar	8 Jumlah sumberdaya perumusan standar yang meningkat kompetensinya	550	orang
5 Meningkatnya kualitas Komtek/ Subkomtek perumusan standar	9 Jumlah Komtek/SubKomtek yang telah memenuhi kriteria penilaian evaluasi kinerja	50	Komtek/ SubKomtek
	10 Persentase Komtek/ SubKomtek perumusan SNI yang dievaluasi kinerjanya	100	%
6 Terwujudnya fasilitasi program perumusan SNI	11 Jumlah SNI yang dikaji ulang	100	kaji ulang
	12 Jumlah fasilitasi perumusan RSNI	100	RSNI
	13 Jumlah fasilitasi penterjemahan dokumen SNI/SI yang digunakan sebagai RSNI	40	RSNI

PUSTAKA ACUAN

[1]. Peraturan Pemerintah Nomor 29/ 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

[2]. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Pemerintah dan Reformasi Birokrasi Nomor: 53/ 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Tata Cara Review Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah